

PERAN KEPALA DESA DALAM MENGELOLA KERJASAMA KELEMBAGAAN DI PEMERINTAHAN DESA TETEHOSSI I KOTA GUNUNGSITOLI

by Gea Riskiaman

Submission date: 27-Oct-2023 01:50AM (UTC-0400)

Submission ID: 2208799674

File name: CEK_PLAGIASI.docx (340.88K)

Word count: 21421

Character count: 143030

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENGELOLA KERJASAMA
KELEMBAGAAN DI PEMERINTAHAN DESA TETEHOSSI**

KOTA GUNUNGSITOLI

SKRIPSI



**Oleh
RISKIAMAN GEA
NIM : 2319416**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NIAS
2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa adalah tempat berkumpulnya sekelompok orang yang terorganisir, artinya desa dihuni oleh orang-orang yang membentuk sistem sosial yang terorganisir. Sistem sosial yang teratur mengacu pada adanya pola perilaku berdasarkan peran, status dan fungsi sekelompok orang yang terkait dengan nilai dan norma yang disepakati bersama.

Desa-desanya harus dilestarikan dan dilindungi keasliannya yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana keberlangsungan pembangunan desa tidak terlepas dari peran masyarakat dan kepemimpinan kepala desa serta perangkat desa yang ada di desa dan lembaga-lembaga yang ada di desa, dimana kerjasama yang baik diantara kepala desa dan kelembagaan sangat penting dalam proses pembangunan inklusivitas. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas dengan ketentuan Pasal 18B Ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana selama mereka hidup dan Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang”

Menurut UU Desa RI No. 6 Tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat, atau disebut juga desa, kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan negara. kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisionalnya yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut ketentuan umum undang-undang desa masing-masing bagian, pemerintah desa adalah kepala desa atau disebut juga perangkat desa dan merupakan bagian dari pemerintahan desa. Kepentingan pemerintah dan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti halnya juga di kemukakan dalam jurnal oleh salah satu peneliti Ndraha, dkk (2018) Desa secara historis dan yuridis telah diakui keberadaannya,

dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbesturende landschappen* dan *Volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya.

Perkembangan sebuah desa bergantung pada kepemimpinan kepala desanya, jika seorang kepala desa menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin dengan baik, maka dia berhasil. Keberhasilan atau kegagalan suatu desa bukan hanya disebabkan oleh kepala desa; namun, keberhasilan desa sangat dipengaruhi oleh kepala desa yang bertanggung jawab dan memiliki peran yang baik. Kepala desa juga bertanggung jawab atas kesalahan atau kegagalan desa.. Hal ini di nyatakan dalam hasil penelitian oleh Bukhari,dkk (2020), yang berjudul *Kepemimpinan kepala desa dalam mewujudkan desa yang maju dan mandiri (studi multi situs pada desa di kecamatan dringu kabupaten probolinggo)* dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan desa bergantung pada kepemimpinan kepala desa. Untuk mencapai hal ini, kepemimpinan kepala desa yang inovatif, progresif, dan visioner sangat diperlukan. Selain itu, menjadi kepala desa adalah tugas yang sulit; dia harus memiliki banyak waktu untuk melayani masyarakat dan siap mengorbankan kepentingan pribadi untuk kepentingan rakyat . Setiap kepala desa yang bertanggung jawab berusaha untuk membuat desa mereka mandiri dan berpartisipasi. Perkembangan desa pasti akan mempercepat pembangunan di daerah dan nasional, oleh karena itu desa membutuhkan peran masyarakat dan kepemimpinan kepala desa dan perangkatnya serta lembaga pemerintahan desa untuk menyukseskan pembangunan (Fairiza 2022:1). Kepala desa adalah ujung tombak pemerintahan desa dan memiliki peran penting sebagai perencana, pengambil kebijakan, dan penentu proses pembangunan desa (Angelia 2022:1).

Kepala desa juga perlu meningkatkan kerjasama, dimana kerjasama memiliki pengaruh yang dapat memperkuat hubungan sosial antar masyarakat serta lembaga pemerintahan desa, membangun rasa kebersamaan, serta dapat meningkatkan kepercayaan antar masyarakat maupun dalam pemerintahan desa. Hal ini di ungkapkan dalam hasil penelitian oleh Anggun Juliana, dkk (2023)

yang berjudul Analisis budaya gotong royong terhadap Kerukunan Beragama di Desa Pambang Pesisir, dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa budaya gotong royong memiliki pengaruh yang signifikan dalam memperkuat hubungan sosial antar anggota masyarakat, membangun rasa kebersamaan, dan meningkatkan kepercayaan antar anggota masyarakat. Melalui kegiatan gotong royong, masyarakat dapat membangun infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mengembangkan ekonomi lokal.

Salah satu metode yang dilakukan kepala desa untuk mendorong partisipasi lembaga pemerintahan desa adalah pembentukan pemerintahan yang Inklusi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, otoritas desa memungkinkan implementasi pemerintahan desa inklusi. Pemikiran pemerintahan desa inklusi berasal dari keinginan untuk membangun gerakan desa mandiri dengan pelayanan prima. Pemerintahan desa inklusi adalah pemerintahan desa yang terbuka, berbicara dengan orang lain, merangkul orang lain, dan toleran. Dalam Bab I Pasal 3 dimana membahas pengaturan pemerintahan desa yang harus didasarkan pada prinsip-prinsip : rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Kepala desa tidak memiliki keterbatasan untuk menjalankan pemerintahan dengan baik untuk semua warga dan juga terhadap semua lembaga yang berada di lingkup pemerintahan desa. Untuk mengelola kerjasama yang inklusif, hal ini harus dipenuhi.

Untuk mewujudkan kesejahteraan dan kerjasama yang baik kepada masyarakat maupun lembaga pemerintahan desa, maka pemerintah desa harus menciptakan desa yang inklusif. Pernyataan ini di perkuat dari hasil penelitian oleh Mutrofin, dkk tahun 2020 dengan judul Kebijakan Pembangunan Desa Inklusif: Analisis Monitoring dan Evaluasi di Kelurahan Sidorejo, Kulonprogo D.I Yogyakarta dimana hasil penelitiannya tersebut mengatakan bahwa pembangunan desa inklusi akan memberikan kesempatan bagi masyarakat yang memiliki peluang mendapatkan kesejahteraan lebih besar. Meninjau monitoring dan evaluasi di desa Inklusi di Kelurahan Sidorejo, Kulonprogo terdapat beberapa tahap, pada tahap monitoring berupa data informasi dan partisipasi sementara

tahap evaluasi terdapat perbaikan pada kesetaraan akses layanan umum, relulasi yang mendukung, perencanaan anggaran yang mengarus utamakan inklusi, problem sosial dalam masyarakat.

Informasi yang telah diperoleh berdasarkan pra-penelitian dari beberapa masyarakat dan juga perangkat desa bahwasannya di dalam pemerintahan desa Tetehosi I masih terdapat kekurangan dalam hal kerjasama diantara pemerintah desa dengan kelembagaan desa. Pj kepala desa saat ini masih belum maksimal dalam mengajak semua aparat serta lembaga-lembaga pemerintahan desa untuk bekerja sama dalam memajukan kesejahteraan masyarakat serta belum maksimal dalam menciptakan suasana pemerintahan desa yang inklusif . Menurut data pra-penelitian, ada empat (4) lembaga pemerintahan di desa Tetehosi I yang berfungsi dan masih beroperasi, yaitu:

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Tabel berikut menunjukkan pra-penelitian terkait tentang hubungan kerjasama antara pemerintah desa dan lembaga pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahan Tetehosi I:

Tabel 1.1

Data pra penelitian

Nama Lembaga	Fungsi Lembaga	Hubungan kerjasama dengan Pemerintah desa
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	<ol style="list-style-type: none"> a. Membahas dan menyepakati Rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 	kurangnya kerjasama dalam hal menentukan waktu yang tepat untuk Membahas dan menyepakati Rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa Tetehosi I Kota Gunungsitoli.
PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan)	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyuluh, motivator, dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program-program PKK b. Fasilitator, perencana, pelaksana, 	Kurangnya kerjasama dalam hal memotivasi lembaga PKK untuk menjalankan Program-

Keluarga)	pengendali, pembina, dan pembimbing Gerakan PKK.	program yang telah direncanakan.
-----------	--	----------------------------------

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	<ul style="list-style-type: none"> a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif. e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat dan f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup 	Kurangnya kerjasama dalam hal mendukung kegiatan LPM untuk ikut bersama dalam mendorong masyarakat ikut kegiatan gotong royong untuk membangun desa Tetelesi I Kota Gunungsitoli
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa; b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan pengelolaan lumbung pangan desa. c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa; d. Pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa; e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa. 	Kurangnya kerjasama dalam mendukung kegiatan BUMDes untuk meningkatkan usaha ekonomi desa melalui usaha yang telah dilaksanakan oleh BUMDes di desa Tetelesi I Kota Gunungsitoli.

Sumber : Olahan Penulis, 2023

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa hubungan antara pemerintah desa dengan lembaga pemerintahan desa Tetelesi I (BPD, PKK, LPM, dan BUMDes). Kerjasama ini perlu ditingkatkan dan dikelola untuk menciptakan hubungan yang harmonis sehingga masyarakat juga dapat merasakan penyelenggaraan pemerintahan desa dan efek positif dari harmonisasi antar lembaga desa. Peran

kepala desa menjadi hal vital dalam mengelola kerjasama sehingga tercipta kolaborasi. Peran tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung kemajuan organisasi, peran kepala desa dalam pengambilan keputusan yang mendorong kerjasama yang inklusif menjadi penting mengingat sosok kepala desa yang juga merupakan pejabat tertinggi di pemerintahan desa. Kondisi ini sangat mempengaruhi posisinya sebagai pemimpin dan mengambil keputusan tentang pengaturan dan perumusan kebijakan terkait pengelolaan kerjasama dengan berbagai keragaman dalam pemerintahan desa.

Meskipun saat ini Kades di desa Tetelesi I adalah seorang Pj. Kades yang notabene bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Pemerintahan Kota Gunungsitoli pada bagian BKSDM, namun peneliti melihat bahwa dia melakukan tugas dengan baik dan malahan dia menunjukkan prestasi dikarenakan seorang Pj. Kades yang dilantik secara resmi dan memakai baju kebesaran seorang Kepala Desa yang disematkan logo-logo seperti cengkol garuda dan tanda pangkat, maka diberikan kepadanya hak dan wewenang penuh seperti halnya Kades yang defenitif serta bertanggungjawab langsung kepada kepala daerah dalam hal ini Walikota Gunungsitoli. Ketika dia tidak menunjukkan hal-hal yang baik dalam bekerja atau tidak melakukan hal-hal yang berprestasi, maka evaluasi akan segera dilakukan padanya. Berbeda dengan Kades defenitif, karena dipilih oleh masyarakat tentunya tidak dapat langsung diganti sebelum 6 tahun masa jabatannya, tetapi ketika seorang yang masih status Pj. Kades bisa saja di evaluasi 6 bulan atau satu tahun diganti. Dengan adanya *punishmen* ketika ia tidak bekerja dengan baik dengan cara evaluasi dan pergantian pada Pj. Kades, maka seorang Pj. Kades akan rugi. Dengan konsekuensi dia dapat tambahan pekerjaan, tentunya adanya konsekuensi tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan ini merupakan hal yang baik bagi seorang Pegawai Negeri Sipil, terlebih dia dapat mengelola anggaran-anggaran desa. Kemudian banyak hal lain seperti karena dia ingin memaksimalkan pekerjaannya maka ia dapat mengganti aparat desanya. Oleh karena itu dengan berbagai macam positif dan untuk meminimalisir negatif yang ada, maka tentunya kita dapat melihat bahwa seorang Pj. Kades meskipun adalah hanya pejabat sementara namun tetap saja dia harus bekerja dengan baik, ditambah lagi Pj Kades Tetelesi I yang sekarang ini berdomisili di desa itu juga, maka

tentunya dia sudah pasti akan melakukan yang terbaik untuk desa Tetehosi I. Khususnya dalam penelitian ini adalah dia harus bekerja dengan baik dalam hal membuat suatu pola kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintahan desa lainnya untuk mencapai tujuan pemerintahan yaitu pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas tentang peran kepala desa dalam pemerintahan desa, peneliti tertarik meneliti **“Peran Kepala Desa Dalam Mengelola Kerjasama Kelembagaan Di Pemerintahan Desa Tetehosi I Kota Gunungsitoli”**.

1.2 Fokus Penelitian

Untuk menghindari bias pada pelaksanaan penelitian, maka peneliti memfokuskan penelitian pada judul yang membahas tentang Peran Kepala Desa Dalam Mengelola Kerjasama Kelembagaan Di Pemerintahan Desa Tetehosi I Kota Gunungsitoli.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran kepala desa dalam mengelola kerjasama kelembagaan di pemerintahan desa Tetehosi I Kota Gunungsitoli?
2. Bagaimana faktor-faktor pendukung dan penghambat kepala desa dalam mengelola kerjasama kelembagaan di pemerintahan desa Tetehosi I Kota Gunungsitoli?
3. Bagaimana strategi yang dilakukan kepala desa dalam mengelola kerjasama kelembagaan di pemerintahan desa Tetehosi I Kota Gunungsitoli?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam mengelola kerjasama kelembagaan di pemerintahan desa Tetehosi I Kota Gunungsitoli.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat kepala desa dalam mengelola kerjasama kelembagaan di pemerintahan desa Tetelesi I Kota Gunungsitoli.
3. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan kepala desa dalam mengelola kerjasama kelembagaan di pemerintahan desa Tetelesi I Kota Gunungsitoli.

1.5 Kegunaan Hasil

1. Kegunaan Teoretis
 - a) Dapat menambah dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan khususnya peran kepala desa dalam mengelola kerjasama kelembagaan di pemerintahan desa Tetelesi I Kota Gunungsitoli.
 - b) Dapat dijadikan acuan di bidang penelitian sejenis atau sebagai bahan pengembangan apabila akan dilakukan penelitian lanjutan.
2. Kegunaan Praktis
 - a) Bagi Peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang peran kepala desa dalam mengelola kerjasama kelembagaan di pemerintahan desa Tetelesi I Kota Gunungsitoli.
 - b) Bagi Masyarakat agar masyarakat mengetahui peran kepala desa dalam mengelola kerjasama kelembagaan di pemerintahan desa Tetelesi I Kota Gunungsitoli.
 - c) Bagi penelitian lain dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti yang akan mengkaji tentang topik yang sama mengenai peran kepala desa dalam mengelola kerjasama kelembagaan di pemerintahan desa Tetelesi I Kota Gunungsitoli.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran

2.1.1 Pengertian Peran

Menurut Lepa dkk. (2019:3) Peran adalah kegiatan seseorang yang dapat memenuhi sesuatu yang diharapkan masyarakat sesuai dengan kedudukannya, sehingga masyarakat melihat peran tersebut dan dapat sangat mempengaruhi kehidupan. Peran terdiri dari tiga hal, yaitu aturan tentang posisi Anda dalam masyarakat. Dalam hal ini, peran adalah norma yang mengajarkan seseorang bagaimana hidup dalam komunitas yang lebih besar. Peran adalah pemahaman tentang apa yang harus dilakukan seseorang dalam kehidupan sosial sebagai suatu pergaulan. Peran juga dapat dipahami seperti tingkah laku seseorang yang penting bagi kedudukan orang tersebut dalam tatanan sosial masyarakat.

Menurut Rahayu (2019:7) Peran adalah posisi yang diberikan seseorang kepada komunitas yang lebih besar, di mana orang tersebut memenuhi fungsi aslinya dalam posisi tersebut sementara posisi tersebut masih terstruktur secara sosial. Dua konsep digunakan untuk menjelaskan peran ini: memahami struktur dan interaksi. Konsep struktur adalah hubungan antara peran budaya dan hak dan kewajiban yang ditentukan oleh sistem budaya suatu wilayah tertentu.

Sementara itu, menurut Kurnia dalam Lutiya Ningrum (2020) Peran adalah ekspresi perilaku tertentu yang dapat mengubah kehidupan masyarakat dan menjadi panutan bagi masyarakat. Ada tiga status dalam masyarakat: tinggi, menengah dan rendah. Jabatan adalah tempat pemenuhan hak dan kewajiban seseorang, yang pemenuhannya disajikan oleh masyarakat sebagai yang tampak kompeten, orang tersebut adalah orang yang memenuhi peran tersebut. Dengan demikian kedudukan seseorang menentukan kekuasaan dan hak-hak yang dimilikinya, yang didasarkan pada hak-hak yang diperolehnya dalam melaksanakan tugasnya.

Secara sosiologis, peran adalah suatu bentuk sikap atau tindakan dalam masyarakat untuk memenuhi kedudukan seseorang, di mana diatur hak dan kewajibannya, yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai pengemban tugas. Komunitas yang lebih besar biasanya mengharapkan peran ini menjadi penting untuk kelangsungan hidupnya, dan ketika perubahan terjadi sesuai keinginan lingkungan, peran tersebut disebut sebagai peran sukses. Peran adalah tugas yang diberikan kepada seseorang dan tugas tersebut harus dilakukan untuk kebaikan masyarakat.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah tingkah laku seseorang yang dapat dijadikan cerminan dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat. Perilaku tersebut diharapkan dapat menimbulkan tingkah laku atau tingkah laku dalam masyarakat yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Peran adalah tindakan yang mempengaruhi atau mengubah keadaan, tergantung pada kedudukan seseorang, bila tidak terlepas dari hak dan kewajibannya. Peran yang bermakna adalah komitmen seseorang dan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu untuk menciptakan ketertiban, kebersihan, dan ketertiban.

2.1.2 Indikator Peran

Menurut Mintzberg dalam buku Pengantar Manajemen Dan buku Kepemimpinan Dalam Manajemen yang di tulis oleh Siswanto dan Miftah Thoha dalam Lazarus sinaga (2018), ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu:

1. Peran Antar pribadi (*Interpersonal Role*), dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar. Peranan ini oleh Mintzberg dibagi atas tiga peranan yang merupakan perincian lebih lanjut dari peranan antarpribadi ini. Tiga peranan ini dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Peranan sebagai tokoh (*Figurehead*), yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya didalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.

- b. Peranan sebagai pemimpin (*Leader*), dalam peranan ini atasan bertindak sebagai pemimpin. Ia melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya diantaranya pemimpin, memotifasi, mengembangkan, dan mengendalikan.
 - c. Peranan sebagai pejabat perantara (*Liaison Manager*), disini atasan melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf, dan orang-orang yang berada diluar organisasinya, untuk mendapatkan informasi.
2. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (*Informational Role*), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi. Peranan interpersonal diatas Mintzberg merancang peranan kedua yakni yang berhubungan dengan informasi ini. Peranan itu terdiri dari peranan-peranan sebagai berikut:
- a. Peran pemantau (*Monitor*), peranan ini mengidentifikasi seorang atasan sebagai penerima dan mengumpulkan informasi. Adapun informasi yang diterima oleh atasan ini dapat dikelompokkan atas lima kategori berikut :
 1. Internal operations, yakni informasi mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan didalam organisasi, dan semua peristiwa yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.
 2. Peristiwa-peristiwa diluar organisasi (*external events*), informasi jenis ini diterima oleh atasan dari luar organisasi, misalnya informasi dari langganan, hubungan-hubungan pribadi, pesaing- pesaing, asosiasi-asosiasi dan semua informasi mengenai perubahan atau perkembangan ekonomi, politik, dan teknologi,yang semuanya itu amat bermanfaat bagi organisasi.
 3. Informasi dari hasil analisis, semua analisis dan laporan mengenai berbagai isu yang berasal dari bermacam-macam sumber sangat bermanfaat bagi atasan untuk diketahui.

4. Buah pikiran dan kecenderungan, atasan memerlukan suatu sasaran untuk mengembangkan suatu pengertian atas kecenderungan-kecenderungan yang tumbuh dalam masyarakat, dan mempelajari tentang ide-ide atau buah pikiran yang baru.
5. Tekanan-tekanan, atasan perlu juga mengetahui informasi yang ditimbulkan dari tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu.
 - b. Sebagai diseminator, peranan ini melibatkan atasan untuk menagani proses transmisi dari informasi-informasi kedalam organisasi yang dipimpinnya.
 - c. Sebagai juru bicara (*Spokesman*), peranan ini dimainkan manajer untuk menyampaikan informasi keluar lingkungan organisasinya.
3. Peranan Pengambil Keputusan (*Decisional Role*), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang di pimpinnya. Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sistem pembuatan strategi organisasinya. Keterlibatan ini disebabkan karena:
 - a. Secara otoritas formal adalah satu-satunya yang diperbolehkan terlibat untuk memikirkan tindakan-tindakan yang penting atau yang baru dalam organisasinya.
 - b. Sebagai pusat informasi, atasan dapat memberikan jaminan atas keputusan yang terbaik, yang mencerminkan pengetahuan yang terbaru dan nilai-nilai organisasi.
 - c. Keputusan-keputusan yang strategis akan lebih mudah diambil secara terpadu dengan adanya satu orang yang dapat melakukankontrol atas semuanya.

2.2 Strategi Publik

Mulgan, seperti yang dikutip oleh Muhammad (2012), mengatakan bahwa strategi publik mengacu pada penggunaan yang sistematis dari sumber daya

publik dan kekuatan oleh lembaga publik untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan penggunaan barang publik. Dalam hal ini, strategi publik dianggap sebagai alat atau pendekatan yang digunakan oleh pemerintah atau entitas publik untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan pemancar. Sebagai dasar untuk menganalisis pentingnya penggunaan sumber daya publik dan kekuatan oleh lembaga publik dalam mencapai tujuan yang terkait dengan barang publik, Mulgan menjelaskan konsep strategi. Dalam analisis ini, kita akan menguraikan konsep Mulgan dalam lima komponen utama: tujuan (*purposes*), lingkungan (*environments*), pengarahannya (*directions*), aksi (*action*), dan belajar (*learning*).

1. Tujuan (*Purposes*)

Menurut Mulgan, konsep strategi publik dimulai dengan mengidentifikasi tujuan apa yang ingin dicapai oleh lembaga-lembaga publik. Semua langkah yang akan diambil didasarkan pada tujuan ini. Dalam strategi publik, tujuan dapat berupa peningkatan layanan publik, efisiensi penyediaan barang publik, atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam situasi ini, tujuan berfungsi sebagai titik awal yang menentukan strategi publik dan menjadi landasan pengambilan keputusan.

2. Lingkungan (*environments*)

Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi strategi publik disebut lingkungan. Ini termasuk perubahan yang terjadi pada sosial, ekonomi, dan politik serta kebijakan publik yang dapat memengaruhi pelaksanaan tujuan. Institusi publik harus beradaptasi dengan lingkungan yang berubah-ubah saat membuat dan menerapkan rencana. Mereka harus mengamati perubahan ini dan menyesuaikan taktik mereka sesuai dengan situasi.

3. Pengarahannya (*directions*)

Konsep strategi publik menetapkan pengarahannya sebagai langkah berikutnya. Ini mencakup pemilihan strategi, kebijakan, dan program yang akan dijalankan. Ini juga mencakup menentukan jalan atau metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Dalam proses ini, pemikiran yang

matang dan analisis yang mendalam tentang pilihan yang tersedia dan bagaimana hal itu akan berdampak pada pencapaian tujuan.

4. Aksi (*Action*)

Pelaksanaan aksi adalah langkah selanjutnya setelah pengarahan. Kebijakan, program, atau tindakan yang telah dipilih dilaksanakan sebagai aksi. Untuk mencapai tujuan, pelaksanaan ini harus dilakukan secara efektif dan efisien. Selain itu, proses ini membutuhkan kerja sama antara berbagai entitas yang terlibat dalam strategi publik, seperti lembaga pemerintah, perusahaan swasta, dan masyarakat.

5. Belajar (*learning*)

Komponen terakhir dari gagasan strategi publik Mulgan adalah belajar. Belajar berarti melakukan evaluasi strategis secara teratur. Ini mencakup melacak hasil, menilai dampak, dan belajar dari pengalaman. Belajar adalah bagian penting dari siklus strategi publik karena membantu lembaga publik memperbaiki dan mengembangkan strategi baru berdasarkan apa yang mereka pelajari dari pengalaman sebelumnya.

Untuk menggunakan gagasan strategi publik, penting untuk memahami bahwa strategi bukanlah dokumen statis; itu adalah proses yang berubah seiring dengan tujuan, lingkungan, pengarahan, aksi, dan pembelajaran. Konsep ini memungkinkan lembaga publik untuk mencapai tujuan mereka dengan lebih efisien dan menghadapi perubahan lingkungan yang tak terhindarkan.

2.3 Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian desa yang dikemukakan bahwa :

Pasal 1 angka 1 disebutkan :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 1 angka 2 disebutkan :

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 1 angka 3 disebutkan :

“Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai administrasi penyelenggara pemerintahan desa”.

Menurut Arifin dalam Lutiya Ningrum (2020) desa adalah wilayah terkecil yang ada di Indonesia yang diberi hak otonomi desa sendiri oleh pemerintah. Hal ini berarti desa diberikan kewenangan secara luas untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri untuk kelangsungan pemerintahan. Tiap desa dapat mengembangkan potensi untuk keberlangsungan pemerintahan serta mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan kemampuan masing-masing akan tetapi dalam mengurus rumah tangganya secara mandiri desa tidak menerima pengaruh dari luar secara berlebihan. Pengaruh dari luar memang membawa perubahan yang cukup signifikan bagi desa maka dari itu pengaruh dari luar ini dianggap sebagai masukan untuk mengukur tingkat kemampuan desa dalam hal menata kehidupan kemasyarakatan meskipun pada kenyataannya setiap desa memiliki tingkatan pemerintahan yang kuat. Meskipun desa diberi hak otonomi desa sendiri akan tetapi dalam melaksanakan sebuah kebijakan, desa menunggu instruksi dari atasan dimana instruksi atau kebijakan tersebut berasal dari pertemuan atau rapat yang dilakukan di kecamatan yang diikuti dengan kepala desa.

2.4 Kepala Desa

2.3.1 Pengertian Kepala Desa

Menurut Surono dalam Lutiya Ningrum (2020) Kepala Desa adalah wakil masyarakat yang dipilih untuk memimpin dan mengurus masyarakat. Setelah kepala desa terpilih, secara otomatis kepala desa menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Kepala desa adalah orang yang menentukan berhasil tidaknya suatu perangkat kepemimpinan di desa, sehingga tugas kepala desa banyak sekali, seperti: Bagaimana melaksanakan pembangunan yang berkeadilan, menjalankan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, membangun masyarakat dan memperkokoh masyarakat desa.

Kepala desa bertugas mengelola kekuasaan dan bertanggung jawab atas pembangunan desa. Ia harus dapat menyeimbangkan kebutuhan pribadinya dengan kebutuhan pemerintah desa agar pemerintah desa dapat mengelola desa dengan baik. Peran dan kedudukan kepala desa tidak dapat dipisahkan, sehingga kepala desa harus memastikan keinginan dan kebutuhan masyarakat desa serta mengutamakan kepentingan desa.

Sementara itu, Wahyudin dkk dalam Lutiya Ningrum (2020) Kepala desa adalah pemimpin yang dipilih masyarakat yang berperan sebagai penentu sukses tidaknya pemerintahan. Kepala desa memimpin masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik melalui pemberdayaan masyarakat, yang dicapai melalui program dan pertemuan yang dipimpin kepala desa.

Desa memiliki banyak potensi sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai tujuan atau untuk mendukung perekonomian. Namun banyak kendala dalam realisasi produksi, seperti Kurangnya modal, manajemen yang sulit dan ketidakmampuan untuk mengakses pasar. Dengan demikian kepala desa memiliki tugas dan peran yang diharapkan oleh masyarakat yaitu sebagai motivasi masyarakat. Motivasi ini diciptakan untuk membuat orang lebih aktif dalam menangani sumber daya alam. Kepala desa juga harus bertindak sebagai fasilitator, yang penting ketika menyediakan sumber daya kepada masyarakat untuk melaksanakan pemasaran. Tujuannya adalah untuk memajukan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, menurut para ahli di atas dapat dikatakan bahwa kepala desa adalah orang yang dipilih oleh masyarakat untuk memimpin organisasi guna memperkuat masyarakat dan merangkul keinginan serta inspirasi masyarakat. Kepala desa menempati posisi yang tinggi di antara perangkat desa dan memikul tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugasnya. Tanggung jawab pelimpahan pekerjaan dapat diberikan kepada kepala desa atau wakil orang lain, sedangkan pekerjaan pengabdian dapat dilakukan oleh kepala desa sendiri atau dapat disebut terpusat.

2.3.2 Tugas dan Kewajiban Kepala Desa

Menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 26 tentang desa bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan kewajiban kepala desa yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 26 ayat 1 berkewajiban untuk memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Republik Indonesia 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender, melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa, menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik, mengelola keuangan dan aset desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, menyelesaikan perselisihan masyarakat desa, mengembangkan perekonomian masyarakat desa, membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa, memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa, mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan memberikan informasi kepada masyarakat desa.

2.3.3 Wewenang Kepala Desa

Menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 26 ayat 1 tentang desa kepala desa memiliki wewenang diantaranya memimpin penyelenggaraan pemerinthan desa, memegang dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraaturan desa, menetaapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besaryakemakmuran masyarakat desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengambangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa, memanfaatkan teknologi tepat guna, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

2.5 Kerjasama

Zainuddin dalam Emiyanti (2019: 10) kerjasama merupakan sifat kepedulian terhadap satu orang atau satu pihak dengan orang atau pihak lain dengan di landasi adanya prinsip saling percaya, saling menghargai. Dimana pemaknaan kalimat tersebut di yakini secara mutlak bahwa guna memenuhi sebuah kebutuhan seseorang perlu adanya keterlibatan atau bentuk interaksi berbagai elemen masyarakat sehingga arah dan tujuan dalam pemenuhan kebutuhan dapat dicapai dan juga mampu memberikan titik temu akan permasalahan yang akan timbul sehingga dapat diatasi secepat mungkin.

Pengertian kerjasama dijelaskan dalam buku berjudul Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Abad 21 yang disusun oleh Abdul Majir (2020:12) bahwa pengertian kerja sama adalah pekerjaan yang dilakukan dua orang atau lebih bekerja bersama-sama untuk mewujudkan tujuan yang efektif dan efisien.

Penjelasan mengenai kerjasama juga disebutkan pada buku Kerja Sama Pemerintahan Antardesa Bagian 1: Konsep Dasar yang disusun oleh Riant Nugroho, Firre An Suprpto (2021:39) bahwa kerja sama pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan.

Menurut penjelasan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kerjasama adalah kebiasaan dari tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih orang secara kolektif dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama-sama. Dalam hal ini, pemerintah desa juga memerlukan kerjasama di antara warga desa dan lembaga-lembaga pemerintahan desa untuk mendapatkan kesejahteraan bersama.

Menurut Hamiruddin dkk (2019:142) dalam V. M. Mendrofa, dkk (2022) kerjasama tim mempunyai beberapa indikator sebagai berikut:

1. Fokus pada tujuan, tim fokus pada tujuan yang telah ditetapkan dalam pencapaian organisasi.
2. Saling memberi motivasi, dalam menyelesaikan tugas, artinya motivasi sangat diperlukan agar anggota termotivasi dalam melakukan sebuah pekerjaan.
3. Menjalin kerjasama sesama tim, sesama anggota tim akan menjalin kerjasama yang baik untuk sebuah tujuan organisasi.
4. Koordinasi dalam proses menyelesaikan tugas, koordinasi dalam setiap tim untuk memudahkan penyelesaian tugas.

2.6 Kelembagaan

2.5.1 Pengertian Kelembagaan

Pengertian Kelembagaan Menurut Fred erickson dan Smith dalam Yayat Rukayat,dkk (2020), Teori Kelembagaan merupakan teori yang melihat organisasi sebagai pembatas sosial yang dibentuk oleh seperangkat aturan, peran, norma dan harapan yang mengatur seseorang/kelompok dalam berperilaku dan menentukan pilihan.

Kelembagaan (institution) merupakan istilah yang sering dikaitkan dengan organisasi yang memiliki struktur dan berorientasi pada peran (role), padahal terdapat hal yang membedakan keduanya. Menurut Bartholomius dalam Rio Akbar Rahmatullah (2021), kelembagaan berfokus terhadap seperangkat aturan

yang mengatur perilaku masyarakat dalam mencapai kebutuhan penting dalam kehidupannya, sedangkan organisasi fokusnya adalah struktur yang merupakan hasil dari interaksi formal maupun informal dari sejumlah peran.

Hessels dan Terjesen dalam Yayat Rukayat,dkk (2020) menyatakan bahwa kelembagaan merupakan struktur sosial yang telah mencapai ketahanan tertinggi dan terdiri dari budaya kognitif, normatif, dan regulative yang sarat dengan perubahan.

Kelembagaan desa merupakan Kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa Rusmianto dalam Yani Kurniawati (2019).

Kelembagaan desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lembaga-lembaga yang ada di desa Tetehosi I, terdiri dari : Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2.5.2 Lembaga Pemerintahan Desa

2.5.2.1 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penataan Desa, pasal 1 ayat (4):

“Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”

Menurut Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa:

1. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:
 - a) Legislasi

Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama pemerintah desa. Fungsi legislasi, BPD sebagai badan legislasi desa mempunyai hak untuk mengajukan rancangan peraturan desa, merumuskannya dan menetapkannya bersama pemerintah desa. Pembuatan

peraturan desa sangat penting karena desa yang sudah dibentuk harus memiliki landasan hukum dan perencanaan yang jelas dalam setiap aktifitasnya. Peraturan desa yang dibuat harus berdasarkan atas masalah yang ada dan masyarakat menghendaki untuk dibuat peraturan desa sebagai upaya penyelesaian permasalahan.

b) Pengawasan

Meliputi pemantauan pelaksanaan peraturan desa; keputusan anggaran pendapatan dan belanja desa adalah milik kepala desa. Badan Pertimbangan Desa (BPD) Melakukan pemeriksaan atau penertiban terhadap peraturan desa dan peraturan kepala desa. Pelaksanaan pengendalian kepala desa dan peraturan kepala desa yang dimaksud disini adalah pelaksanaan pengawasan APBD dan RKPD yang dijadikan peraturan desa. Juga memantau keputusan kepala desa. BPD bertanggung jawab untuk mengontrol ketertiban desa, dalam hal ini mengontrol semua inisiatif Aparat desa. Semua kegiatan perangkat desa selalu dikontrol oleh BPD baik langsung maupun tidak langsung, hal ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran.

2.5.2.2 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan yang sudah begitu melembaga baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa. Bahkan kemudian PKK dengan kegiatannya telah merambah hingga ke tingkat dusun dan RT. Agar pengelolaannya efektif, dibentuklah Tim Pembina (TP) PKK di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Tim Pembina PKK berfungsi untuk mengakomodir dan memfasilitasi berbagai kegiatan dalam rangka menunjang berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di wilayahnya masing-masing (Indarwati dalam Jesita Aprilia 2022).

Pada awalnya, organisasi ini diberi nama Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang di dalamnya menekankan partisipasi perempuan dan merupakan program pendidikan perempuan. Namun, seiring berjalannya waktu, organisasi ini berubah nama menjadi

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Perubahan nama ini dilandasi oleh pemikiran bahwa organisasi ini tidak hanya mendidik kaum perempuan, akan tetapi membina serta membangun keluarga di bidang mental, spiritual, fisik, dan material serta peningkatan sandang, papan, kesehatan, serta mutu dan juga keluarga sejahtera (Haniz dan Marzaman dalam Jesita Aprilia 2022)

Jadi, pada dasarnya organisasi PKK merupakan organisasi yang dibentuk untuk mendukung dan membantu program-program pemerintah. Bentuk dukungan dan bantuan itu berupa menyuplai data beberapa aspek yang diperlukan seperti data warga, data ibu hamil, bayi, balita, kelahiran, kematian sampai pada kegiatan masyarakat (Hanis dan Marzaman dalam Jesita Aprilia 2022).

2.5.2.3 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Landasan hukum dari peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan desa yang berlaku tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu berada pada bagian ke satu Lembaga Kemasyarakatan Desa pasal 94, yang menyebutkan:

- a. Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Lembaga kemasyarakatan desa merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa.
- c. Lembaga kemasyarakatan desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
- d. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan lembaga non pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang berada di tingkat desa yang bertugas sebagai mitra pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan desa. Kemitraan yang dilakukan oleh LPM dengan Pemerintah Desa dalam proses perencanaan pembangunan bertujuan dilakukan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi, sosial dan kebudayaan daerah pedesaan serta untuk mempromosikan kerja sama antara organisasi dalam wilayah tersebut agar bisa mempromosikan pembangunan dan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat setempat.

2.5.2.4 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah organisasi usaha desa bagi pemerintah desa yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Peraturan Desa (Perdes) tentang pendirian badan usaha desa sesuai hasil yang disepakati dalam musyawarah desa.

Komitmen pemerintah terhadap pembangunan BUMDes dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur tentang desa. Sebelumnya, pembuatan BUMDes diatur oleh hukum dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, ketentuan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, peraturan tentang pembentukan, pembangunan, dan pembubaran BUMDes mengalami sedikit perubahan. BUMDes didirikan untuk menjadi tulang punggung penggerak perekonomian desa untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Yudanto dalam Budi Harsono, dkk 2020).

2.7 Inklusivitas

2.6.1. Pengertian Inklusivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata inklusif mempunyai arti termasuk; terhitung. Pengertian inklusi digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang terbuka; mengajak dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya.

Sedangkan inklusi social adalah upaya menempatkan martabat dan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal.

Istilah "Inklusif" berasal dari kata bahasa Inggris "inclusion", yang berarti menerima atau mengikutsertakan berbagai kelompok orang. Menurut Dinar Westri Andini et al. dalam buku Pengembangan Kurikulum dan Implementasi Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar (2020), konsep inklusif digunakan sebagai cara untuk membuat lingkungan yang terbuka untuk semua orang dengan berbagai latar belakang. Karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya, ekonomi, dan lain-lain adalah beberapa contoh perbedaan latar belakang ini. Inklusif berarti memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah inklusif juga digunakan. Menerima berbagai jenis keberagaman adalah tanda masyarakat yang inklusif. Menurut situs Dinsos Kabupaten Buleleng, keberagaman dan perbedaan diterima dalam berbagai tatanan dan infrastruktur kehidupan sosial.

Inklusi berarti mengakui dan menghargai bahwa keberagaman dan perbedaan memang ada. Sebagai contoh, orang-orang dengan disabilitas atau kebutuhan khusus harus diperlakukan dengan hormat dan penghargaan, tanpa diskriminasi, dan secara setara. Karena sikap perilaku inklusif memiliki banyak manfaat, sikap ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut ini adalah manfaat dari sikap perilaku inklusif dalam masyarakat, menurut sumber belajar Kemdikbud:

- a. Menghargai perbedaan, sehingga memupuk persaudaraan
- b. Memperkuat modal sosial dan pengembangan jaringan
- c. Memupuk masyarakat yang terbuka dan saling menghargai
- d. Mengedepankan budaya musyawarah dalam memecahkan persoalan
- e. Terciptanya ketentraman dan kedamaian.

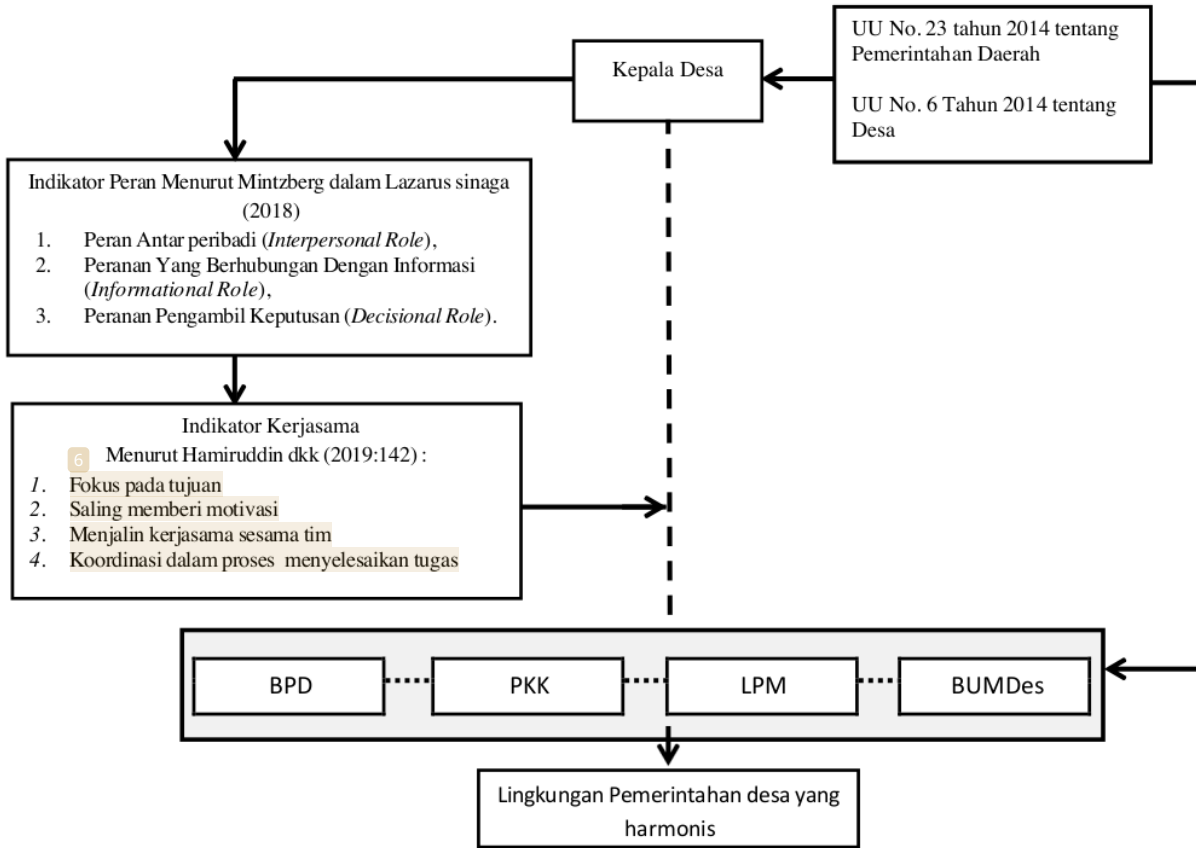
2.6.2. Indikator Inklusivitas

Menurut Purnamaningtyas dan Rahardja (dalam Puput Fitria Dynata 2022), ada beberapa indikator inklusivitas, yakni :

1. Keterbukaan
2. Keadilan Dalam Pemberian Kesempatan
3. Kepedulian
4. Keterlibatan orang lain Dalam Pengambilan Keputusan
5. Menghargai Keberagaman.

2.8 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Sumber : Olahan Penulis 2023

2.9 Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan didalam penelitian ini. Dari penelitian ini penulis belum menemukan judul yang sama persis dengan penelitian yang penulis lakukan. Namun penulis mengangkat beberapa judul penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian ini.

Berikut merupakan beberapa jurnal ataupun skripsi penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis:

Tabel 2.1

Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan
1.	Yulianus Nardin (2019)	Kebijakan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat pada program BUMDes	Penelitian menunjukkan bahwa Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat pada Program BUMDes sesuai dengan program strategi pemberdayaan yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan kelompok, pemupukan modal masyarakat (swasta), pengembangan usaha produktif, dan penyediaan informasi tepat guna belum sepenuhnya berjalan efektif, dikarenakan pada Proses pengembangan kelembagaan kelompok yaitu masih dalam proses transisi perbaikan, dalam hal ini pertanian <i>hydroponic</i> mengalami kemacetan pada staf khusus pengelola, yang mengakibatkan pertanian <i>hydroponic</i> tidak terawat.	Perbedaan : 1. Lokasi penelitian, penelitian terdahulu berlokasi di desa Pesanggrahan Jln. Suropati Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur., Sedangkan penelitian penulis di Desa Tetelesi I Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli 2. Fokus pada pengembangan BUMDes.

2.	Bukhari,dkk (2020)	Kepemimpinan kepala desa dalam mewujudkan desa yang maju dan mandiri (studi multi situs pada desa di kecamatan dringu kabupaten probolinggo)	a. perkembangan desa bergantung pada kepemimpinan kepala desa. Untuk mencapai hal ini, kepemimpinan kepala desa yang inovatif, progresif, dan visioner sangat diperlukan. Selain itu, menjadi kepala desa adalah tugas yang sulit; dia harus memiliki banyak waktu untuk melayani masyarakat dan siap mengorbankan kepentingan pribadi untuk kepentingan rakyat . Setiap kepala desa yang bertanggung jawab berusaha untuk membuat desa mereka mandiri dan berpartisipasi	Perbedaan : 1. Lokasi penelitian 2. Fokus pada kepemimpinan kepala desa
3.	Isra Hayati (2021)	Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Perempuan (studi kasus desa lamamek, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh)	1. Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan Perempuan di Desa Lamamek Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue sudah optimal jika diukur dari tiga indikator yang meliputi <i>politic</i> (kebijakan), <i>strategy</i> (strategi), dan <i>communication</i> (komunikasi). 2. Faktor yang menghambat pemerintah desa dalam pemberdayaan perempuan desa yaitu sumberdaya manusia yang belum memadai, kemudian kurangnya minat, kurangnya kepedulian; ketertarikan dan rendahnya partisipasi para perempuan yang ada di desa dalam menjalankan usaha kecil menengah yang telah pemerintah berikan.	1. Lokasi penelitian. 2. Fokus pada pemberdayaan perempuan. 3. Perbedaan landasan teori
4.	Iin Endah Setyawati, dkk (2022)	Analisis kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor penghambat kinerja pegawai di kantor Desa Cinunuk adalah tidak semua pegawai memahami	1. Lokasi Penelitian 2. Fokus Pada kinerja aparatur desa 3. Perbedaan landasan teori.

		Pemerintah desa di kantor desa cinunuk	sistem aplikasi komputer. Selain itu, kurangnya disipin pegawai dalam melaksanakan tugasnya.	
5.	Anggun Juliana, dkk (2023)	Analisis budaya gotong royong terhadap Kerukunan Beragama di Desa Pambang Pesisir	Budaya gotong royong memiliki pengaruh yang signifikan dalam memperkuat hubungan sosial antar anggota masyarakat, membangun rasa kebersamaan, dan meningkatkan kepercayaan antar anggota masyarakat. Melalui kegiatan gotong royong, masyarakat dapat membangun infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mengembangkan ekonomi lokal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan Lokasi penelitian 2. Fokus pada ketahanan pangan pada masa Covid-19.
6.	Viat Murni Mendrofa, Ayler B. Ndraha, Yasminar Amaerita Telaumbanua (2022)	Peran kepemimpinan transformasional di Pt. Cabang Bank SUMUT Gunungsitoli dalam menjaring kerjasama dengan stakeholder sebagai Mitra kerja Pemerintah di Kota Gunungsitoli	Hasil penelitian yaitu hasil yang diperoleh dari pengujian deskriptif menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional di PT. Cabang Bank Sumut berada pada kategori tinggi sebesar 68,5%, dan bahkan didapatkan 18,5% kepemimpinan transformasional kategori sangat tinggi, sedangkan kepemimpinan transformasional kategori rendahnya hanya 13%.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan lokasi penelitian. 2. Perbedaan metode penelitian yang digunakan. 3. Fokus pada kepemimpinan transformational.
7.	Ferdi Harobu Ubi Laru Agung Suprojo (2019)	Peran Pemerintah Desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Peranan pemerintah desa dalam pengembangan BUMDes Unit Pengelola Keuangan (UPK) Setya adalah <ol style="list-style-type: none"> a) Sebagai fasilitator, b) Pemerintah Desa Tlekung memberikan asistensi (melakukan pendampingan), 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan lokasi penelitian. 2. Fokus pada pengembangan BUMDes.

			<p>mentoring dan coaching terhadap Pengurus BUMDes,</p> <p>c) Pemerintah Desa mendukung setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh UPK Setya terutama masalah penganggaran,</p> <p>d) Memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai keberadaan BUMDes, dan</p> <p>e) Mendorong BUMDes UPK Setya untuk bekerjasama dengan pihak ketiga</p>	
8.	Chamid Sutikno, Lupita Ariantika Sari, Ajis Setiawan (2022)	Collaborative governance terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga	<p>BUMDes Makmur Sejahtera belum sepenuhnya menjalankan keseluruhan aspek pada proses Collaborative Governance dalam pengembangan dan pengelolaan BUMDes Makmur Sejahtera. Pengembangan dan pengelolaan telah membatasi kerjasama dengan pihak dari luar dan hanya bekerjasama dengan pihak internal seperti pengurus BUMDes, Pemerintah Desa, Badan Pengawas Desa (BPD) dan masyarakat. Atas dasar tersebut, tidak adanya persamaan persepsi masing-masing pihak, sehingga tidak bisa menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat sebagai aktor pendukung yang dapat menguntungkan dan berdampak baik bagi pemerintah, masyarakat dan BUMDes Makmur Sejahtera seperti peningkatan perekonomian masyarakat desa dan peningkatan pendapatan asli desa.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan lokasi penelitian 2. Focus pada pengembangan dan pengelolaan BUMDes. 3. Teknik analisis data peneliti terdahulu menggunakan teknik <i>cresswell</i>, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan teknik Miles dan Huberman
9.	Alfianto (2021)	Kolaborasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di	<p>kolaborasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan yaitu fase mendengarkan, fase dialog, dan fase pilihan. kolaborasi antara Badan Permusyawaratan Desa dan kepala Desa menunjukkan kolaborasi yang baik, hanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. perbedaan lokasi penelitian 2. fokus pada pembangunan infrastruktur desa 3. perbedaan landasan teori

		Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur	saja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa di Desa Laikang belum maksimal terutama dalam menampung aspirasi masyarakat.	
10.	A. Imran (2022)	Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Balle Kecamatan Kahu Kabupaten Bone	Peran kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Balle Kecamatan Kahu Kabupaten Bone masih kurang maksimal, sedangkan untuk Partisipasi Masyarakat, masih banyak masyarakat yang belum mempunyai kesadaran dan kemauan apabila ditinjau dari aspek 1. Motivator, sudah cukup baik tapi perlu ditingkatkan lagi, kepala desa memberikan motivasi terhadap bawahannya untuk mengembangkan bakat, kemampuan dalam mewujudkan kantor desa yang lebih bagus dalam menjalankan semua tugas yang diberikan oleh kepala desa Balle. 2. Fasilitator, sudah dipandang optimal dalam memfasilitasi kegiatan pembangunan. kepala desa telah menyediakan sarana dan prasarana untuk masyarakat dan perangkat desa untuk memfasilitasi pembangunan desa balle. 3. Mobilisator, sudah baik, dalam menjalankan perannya mereka bergerak atau melakukan sesuatu sehubungan dengan pembangunan untuk kepentingan umum, kepala desa selalu mendorong masyarakat dan aparat pemerintah untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan	1. Perbedaan lokasi penelitian 2. Fokus pada partisipasi masyarakat terhadap pebangunan 3. Perbedaan landasan teori

			desa.	
11.	Ajisman Efendi (2019)	Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara	paya yang dilakukan Pemerintah Desa melalui BUMDes dengan kegiatan Kerajinan Menjahit dan Bedah Rumah. Program yang dibuat yaitu membedah rumah masyarakat dan memberikan peluang kerja kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan oleh Kepengurusan BUMDes dengan melakukan membedah rumah dan membuat Konveksi Sekolah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.	1. Perbedaan Lokasi penelitian 2. Fokus pada kegiatan yang dilakukan BUMDes
12.	Fenita Enggraini, Nanda Cahyani Putri, Yusda Aripin Salman, Wiwandari Handayani (2020)	Peran Kelembagaan Pemerintah Desa dalam Memajukan Desa Ponggok-Polanharjo, Klaten	Kepala Desa merupakan tokoh kunci (<i>key player</i>) yang memiliki peran, kepentingan dalang besar serta pengaruh yang sangat kuat untuk mempengaruhi/ melibatkan <i>stakeholder</i> lain dalam pengembangan Desa Ponggok.	1. Perbedaan lokasi penelitian 2. Perbedaan landasan teori 3. Fokus pada pengembangan BUMDes melalui <i>stakeholder</i>
13.	Ayler Beniah Ndraha dan Dedy Pribadi Uang (2018)	Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Di Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara	Hasil dari strategi pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi lokal menyatakan bahwa perlu adanya sinkroniasi sektoral yang terdiri pemerintah, swasta, dan masyarakat. Beberapa faktor yang belum mendukung strategi pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi lokal di Kabupaten Halmahera Barat yaitu faktor komunikasi, pemetaan potensi daerah, sumber daya manusia, infrastruktur, dan monitoring dan evaluasi.	1. Perbedaan lokasi penelitian 2. Fokus pada Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa

14.	Lutfi Runkel, Belinda Sam, M Chairul Basrun Umanailo (2020)	Hubungan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa	Kinerja aparatur pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa, BPD dan ditambah dengan lembaga adat adalah sebagai bagian dari keinginan masyarakat dimana pemerintahan desa mampu bekerja secara baik dan benar dalam pelaksanaan proses pembangunan desa. Disamping itu pula Kepala Desa harus memiliki kemampuan dalam pengelolaan administrasi desa maupun tentang pengelolaan data-data yang berkaitan dengan desa serta pelayanan kepada masyarakatnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan lokasi penelitian 2. Fokus pada kinerja daripada aparatur pemerintahan desa.
15.	Didik Julian (2021)	Pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap pelayanan Administrasi pemerintahan bidang layanan sipil di desa Laban Kecamatan menganti kabupaten gresik	Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap Pelayanan administrasi pemerintahan bidang layanan sipil di Desa Laban Kecamatan Menganti cukup kuat dan signifikan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan lokasi penelitian 2. Fokus pada pelayanan desa 3. metode penelitian

Sumber : Internet (diakses pada tanggal 16 Mei-22Juni tahun 2023)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Menurut Moleong (2018:6) pendekatan dalam penelitian merupakan secara keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat kesimpulan.

Adapun beberapa pendekatan penelitian dalam kualitatif itu adalah sebagai berikut:

- a. Studi kasus diartikan sebagai metode atau strategi dalam penelitian untuk mengungkap kasus tertentu.
- b. Deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada masa sekarang.
- c. Fenomenologi diartikan sebagai studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut.

Berdasarkan pendapat diatas maka jenis pendekatan kualitatif pada penelitian penulis ini adalah dengan pendekatan Deskriptif. Yaitu untuk mendeskripsikan gejala, peristiwa, serta kejadian yang terjadi pada masa sekarang di desa Tetelesi I.

Berikut adalah jenis-jenis penelitian menurut Sugiyono (2020:9):

a. Penelitian kualitatif

Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2020:9) adalah penelitian yang dilakukan kepada objek penelitian yang mengalami peristiwa dimana peneliti menjadi instrumen kunci didalam penelitian.

b. Penelitian kuantitatif

Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2020:9) adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara melakukan pengumpulan data yang memanfaatkan instrumen penelitian sering disebut cara-cara kuantifikasi (pengukuran). Dalam pendekatan kuantitatif

hakekat hubungan diantara variable-variabel dianalisis dengan menggunakan teori yang obyektif.

c. Riset gabungan

Riset gabungan menurut Sugiyono (2020:9) adalah riset yang menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif.

Berdasarkan teori di atas, penulis menetapkan bahwa penelitian ini akan dilakukan dalam jenis penelitian kualitatif karena jenis penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, atau aktivitas sosial yang terjadi di masyarakat. Jenis penelitian kualitatif dipilih karena sesuai dengan kebutuhan penelitian untuk melihat dan memaparkan gejala-gejala yang terkait dengan masalah penelitian.

3.2 Variabel Penelitian

Terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan dengan jelas sebelum mulai pengumpulan data dalam sebuah penelitian, menurut Sugiyono (2018:55), variabel adalah: "Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan."

Dalam penelitian, variabel penelitian mencakup segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dengan tujuan mendapatkan informasi tentang hal tersebut dan kemudian menghasilkan kesimpulan (Sugiyono, 2018:57). Jadi, dapat disimpulkan bahwa defenisi variabel adalah penekanan pada variabel penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur akurasi data dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan indikator variabel penelitian. Dalam penelitian ini yang merupakan variabel adalah:

Tabel 3.1

Variabel dan Indikator Penelitian

No	Variabel	Indikator
1.	Peran	Menurut Mintzberg dalam Lazarus sinaga (2018) 1. Peran Antar peribadi (<i>Interpersonal Role</i>), 2. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (<i>Informational Role</i>), 3. Peranan Pengambil Keputusan (<i>Decisional Role</i>).

2.	Kerjasama	Menurut Hamiruddin dkk (2019:142) <i>1. Fokus pada tujuan</i> <i>2. Saling memberi motivasi</i> <i>3. Menjalin kerjasama sesama tim</i> <i>4. Koordinasi dalam proses menyelesaikan tugas</i>
----	-----------	---

Sumber: Olahan Penulis,2023

3.3 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Dengan menetapkan lokasi penelitian maka objek penelitian dan tujuan penelitian tentunya sudah tetap dan jelas. Sehingga dapat mempermudah proses penelitian dan dapat melakukan penelitian guna mendapatkan hasil yang akurat. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tetelesi I, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, alasan peneliti ingin meneliti dilokasi tersebut adalah karena lokasi mudah dijangkau sehingga dapat lebih memudahkan bagi penulis untuk melakukan penelitian.

Untuk melaksanakan penelitian ini, peneliti telah membuat jadwal sebagai panduan bagi peneliti dalam merancang dan menyelesaikan penelitian ini nantinya. Adapun rancangan jadwal penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 3.2
Jadwal Penelitian

Kegiatan	Jadwal																														
	April 2023			Mei 2023				Juni 2023				Juli 2023				Agustus 2023				September 2023				Oktober 2023							
	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Kegiatan Proposal Skripsi	■	■	■																												
Konsultasi kepada Dosen Pembimbing				■	■	■	■	■	■	■	■																				
Pendaftaran Seminar Proposal Skripsi												■	■																		
Pengumpulan Data																■	■	■	■												
Penulisan Naskah Skripsi																				■	■										
Konsultasi Kepada Dosen Pembimbing																								■	■						
Penulisan dan Penyempurnaan skripsi																												■			
Ujian skripsi																												■	■		
Perbaikan Skripsi																													■	■	

Sumber : Olahan Penulis, 2023

3.4 Sumber Data

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2018) Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Apabila peneliti misalnya menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan, baik tertulis maupun lisan.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok focus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (V. Wiratna Sujarweni, 2018). Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer yang dilakukan dengan kepala desa, kepala-kepala dusun, ketua-ketua lembaga pemerintahan desa serta tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama desa Tetelesi I.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data (V. Wiratna Sujarweni, 2018). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder bersumber dari website atau artikel serta dokumen yang berhubungan dengan peran kepala desa dan kerjasama.

3.5 Instrumen dan Informan Penelitian

3.5.1. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:250) instrument penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun social yang diamati. Dimana instrument penelitian pada penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri.

Dimana peneliti akan menjadi alat untuk merekam informasi selama berlangsungnya penelitian.

3.5.2. Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:250), informan penelitian adalah orang-orang yang digunakan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian. Peneliti dapat mengakses semua sumber informasi tentang subjek penelitian melalui informan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, kepala-kepala dusun, ketua-ketua lembaga pemerintahan desa serta tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama desa Tetelesi I. Informasi mengenai informan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3

Data Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Elberta Zebua, S.E.	Pj. Kepala Desa Tetelesi I
2.	Yang Setia Zebua	Kepala Seksi Pelayanan Desa Tetelesi I
3.	Viktor Bate'e	Anggota BPD Tetelesi I
4.	Rosmeni Larosa	Bendahara TP. PKK Desa Tetelesi I
5.	Foarota Zamasi	Ketua LPM Desa Tetelesi I
6.	Faevman Gea	Direktur BUMDes Tetelesi I
7.	O'ozanolo Gea	Tokoh Masyarakat Desa Tetelesi I
8.	Arieli Gea	Tokoh Agama Desa Tetelesi I

Sumber : Olahan Penulis, 2023

Pemilihan Informan dalam penelitian ini yaitu berdasar pada *Purposive Sampling* dimana Menurut Sugiyono (2019) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Artinya pengambilan sampel didasarkan pada pertimbangan atau kriteria tertentu yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Hamzah (2019) Teknik pengumpulan data kualitatif merupakan pengumpulan data-data yang bersifat deskriptif, yaitu data berupa tanda-tanda hasil wawancara atau observasi yang dikategorikan dalam bentuk lainnya seperti foto, dokumen, artefak, dan catatan-catatan saat penelitian di lapangan.

Menurut Sugiyono (2019:65) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulannya adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, Menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Dalam penelitian ini, observasi dilaksanakan pada Desa Tetehosi I, Kec. Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli.
- b. Wawancara, Menurut Sugiyono (2018) wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dan jumlah responden sedikit atau kecil. Wawancara merupakan sesi tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti yang dilaksanakan secara tatap muka dengan kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala seksi pelayanan, kepala-kepala dusun, ketua-ketua lembaga pemerintahan desa serta tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama desa Tetehosi I.
- c. Dokumentasi Menurut Hamzah (2019), Dokumen adalah sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berasal dari dokumentasi. Sebagian besar data laporan, artefak, foto, dan lainnya sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui kejadian yang pernah terjadi di masa silam. Secara detail bahan dokumentasi terbagi menjadi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, kliping, memorial, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flasdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain. Jenis dokumentasi yang digunakan sebagai data penelitian. Dokumen harian dan dokumentasi resmi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

dokumentasi berupa bukti foto, buku catatan, hasil notulen rapat keputusan pimpinan dari kantor desa Tetehosi I.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Data tersebut diperoleh dari aktivitas penelitian yang dilakukan, yaitu dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan pencarian dokumen atau berita-berita lain dari berbagai media yang menjadikan hasil penelitian dapat disusun secara lengkap dan mudah dipahami sehingga dapat diinformasikan kepada orang lain dengan benar. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus- gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat- peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

2. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan

menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar benar dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Desa Tetehosi I

4.1.1. Profil dan Sejarah Desa Tetehosi I

Desa Tetehosi I adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli yang mana pada zaman dahulu menurut beberapa Tokoh masyarakat Desa Tetehosi I, bahwa wilayah Desa Tetehosi I Dahulu disebut TETE artinya Yawa badete. HOSI artinya kara nifalaete berada dalam satu kesatuan ADAT yang disebut Yawa badete Kara Nifalaete menjadi Desa Tetehosi I yang artinya Modane dane Bawahasara Dodo Mbanua., karena kampung mereka ada diatas gunung yang berbatu. Pada dasarnya terdiri dari beberapa puluh kampung yang dikepalai oleh seorang Kepala Negeri dari Tahun 1959-1964 atas nama menjadi kepala Negeri adalah KATUMBUKHA GEA. Sehingga pada Tahun 1964 sampai dengan Tahun 1969 beralih menjadi kepala kampung atas nama FANGARO GEA, dan pada Tahun 1970 sampai dengan Tahun 1986 beralih menjadi Kepala Desa atas nama ANGERAGO GEA. Pada Tahun 1986 sampai dengan Tahun 1998 Kepala Desa beralih dilanjutkan atas nama SALTUYAN GEA, Pada Tahun 1998 sampai dengan Tahun 2009 Kepala Desa dijabat atas nama EDUAR GEA, Pada Tahun 2009 sampai dengan 2013 Kepala Desa dijabat atas nama AGUSTINUS GEA, Pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019 dijabat atas nama BERKATMAN GEA, Pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 dijabat atas nama SEPSOLA FIDE KUDUS ZAMASI, S.Pd dan Pada Tahun 2022 sampai sekarang Penjabat Kepala Desa Tetehosi I atas nama ELBERTA ZEBUA, SE

Desa Tetehosi I terletak didalam wilayah Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Siwalubanua II,
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Fowa.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Idanotae
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Siwalubanua I dan Desa Hiliweto Idanoi

Luas Wilayah Desa Tetelesi I adalah 18,86 Ha dimana 25% berupa dataran yang bertopografi berbukit-bukit, dan 75% dataran dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Iklim Desa Tetelesi I, sebagaimana Desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan hujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola pertanian dan perkebunan yang ada di Desa Tetelesi I Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.

Penduduk Desa Tetelesi I berasal dari Masyarakat Suku Nias yang turun temurun sejak Desa Tetelesi I berdiri. Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong-royong dan kearifan lokal sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Tetelesi I dan hal tersebut secara efektif dapat menghindar adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

Perkembangan Sejarah Desa Tetelesi I dari Waktu- ke waktu dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

No	Nama	Masa Periode	Kejadian Penting
1	2	3	4
1.	FANGARO GEA	1964 s/d 1969	
2.	ANGERAGO GEA	1970 s/d 1986	
3.	SALTUYAN GEA	1986 s/d 1998	
4.	EDUAR GEA	1998 s/d 2009	
5.	AUGUSTINUS GEA	2009 s/d 2014	
6.	BERKATMAN GEA	2014 s/d 2019	
7.	SEPSOLA F. K. ZAMASI, S.Pd	2019 s/d 2022	
8.	ELBERTA ZEBUA, SE	2022 Sampai Sekarang	

4.1.2. Visi dan Misi Desa Tetelesi I

4.1.2.1. Visi Desa Tetelesi I

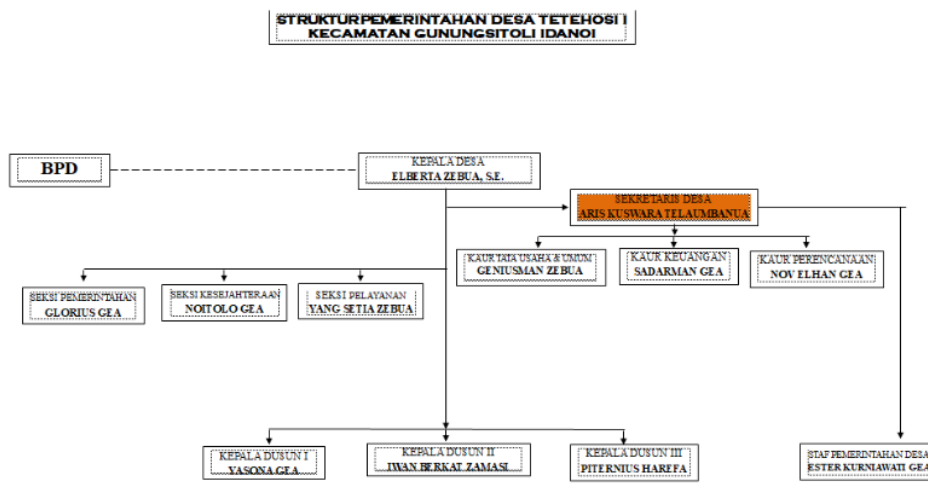
“ DESA TETELES I JUJUR, BERSIH DAN BERDAYA SAING”

4.1.2.2. Misi Desa Tetehosi I

1. Melakukan Reformasi Sistem Kerja Aparatur Pemerintah Desa yang beriman, dan bekerja sungguh-sungguh guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
2. Menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih, terbebas dari Korupsi serta bentuk-bentuk Penyelewengan lainnya;
3. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa secara terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
4. Meningkatkan Perekonomian masyarakat melalui Pendampingan berupa penyuluhan khusus pada usaha mikro kecil dan menengah, Pengusaha Jasa, Pertanian dan Perikanan;
5. Meningkatkan mutu Kesehatan masyarakat melalui pelaksanaan Kesehatan dengan bekerjasama dengan pusat-pusat pelayanan masyarakat seperti Bidan Desa, Puskesmas dan Rumah sakit;
6. Meningkatkan taraf Pendidikan melalui Pendataan masyarakat untuk mendapatkan KIP, PKH, KUBE, dan KKS;
7. Memberdayakan Kelompok-kelompok tani, baik padi sawah, peternakan, dan perkebunan;
8. Mendorong terlaksananya pembangunan Infrastruktur untuk memperlancar pengangkutan hasil-hasil produksi masyarakat.

4.1.3. Struktur Pemerintahan Desa Tetehosi I

Tabel 4.1 Struktur Pemerintahan Desa
Tetehosi I



4.1.4. Uraian Tugas dan Tanggungjawab

4.1.4.1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Tugas dan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tetelesi I, berikut adalah tugas dan tanggung jawab yang biasanya menjadi bagian dari peran BPD dalam masyarakat:

1. Menyelenggarakan diskusi masyarakat
2. Mengembangkan rencana pengembangan masyarakat
3. Mengelola Aset Desa
4. Pengelolaan Keuangan desa
5. Penerimaan laporan dari pemerintah desa
6. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat dan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.1.4.2. Kepala Desa

Tugas dan tanggung jawab kepala desa, termasuk Kepala Desa Tetelesi I, dapat berbeda-beda tergantung peraturan dan kebijakan yang berlaku di daerah tersebut. Namun secara umum, berikut tugas dan tanggung jawab yang umumnya dikaitkan dengan jabatan kepala desa:

1. Bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa secara efektif dan efisien.
2. Menyusun rencana pembangunan desa, meliputi identifikasi kebutuhan, penyusunan program pembangunan, dan pengalokasian anggaran desa sesuai prioritas yang telah ditentukan.
3. Memastikan alokasi dana sesuai dengan prioritas pembangunan desa, dan memastikan dana digunakan secara transparan dan bertanggung jawab.
4. Bertanggung jawab memberikan pelayanan dasar kepada penduduk desa seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain.

5. Memantau pelaksanaan program dan pembangunan desa, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan mengambil tindakan perbaikan bila diperlukan.
6. Menjalin hubungan baik dengan masyarakat desa, mendengarkan keluhan mereka dan mendiskusikan kebijakan dan program pemerintah desa secara terbuka.
7. Bertanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan di desa, termasuk mengoordinasikan pengamanan dengan kepolisian dan instansi terkait.
8. Melaporkan secara berkala kepada pemerintah daerah dan instansi terkait mengenai pelaksanaan program dan penggunaan anggaran desa. Hal ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
9. Memperkuat pemberdayaan masyarakat, mengajak warga desa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa dan berperan dalam pengambilan keputusan.

4.1.4.3. Sekretaris Desa

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Desa Tetelesi I pada umumnya adalah menangani pengurusan dan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Berikut beberapa tugas dan tanggung jawab yang biasanya diemban Sekretaris Desa Tetelesi I:

1. Mendukung kepala desa dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
2. Mencatat dan menyimpan seluruh dokumen dan keputusan pemerintah desa.
3. Menyelenggarakan pertemuan desa, termasuk menyiapkan agenda, mengirimkan undangan dan menyimpan hasil pertemuan.
4. mencatat hasil pertemuan dan buat laporan kepada kepala desa dan pemangku kepentingan.
5. Membantu perencanaan pembangunan desa dan penyusunan anggaran.
6. Mengelola pengelolaan keuangan desa, termasuk pencatatan pendapatan dan pengeluaran.

7. Memberikan informasi dan merespon kebutuhan masyarakat terkait pengelolaan desa seperti penerbitan akta, akta kelahiran dan kebutuhan lainnya.
8. Menyampaikan laporan dan permintaan masyarakat kepada pemerintah desa.
9. Memelihara dan memperbarui data populasi desa, lahan dan inventarisasi.
10. Pengelolaan database desa penting untuk perencanaan dan pengambilan keputusan.

4.1.4.4. Kaur Tata Usaha dan Umum

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum (Administrasi dan Kaur Umum) Desa Tetelesi I mempunyai sejumlah tugas dan tanggung jawab yang fokus pada pengurusan umum dan administrasi di tingkat desa. Berikut adalah beberapa tugas dan tanggung jawab yang mungkin menjadi bagian dari peran ini:

1. Bagian Administrasi Umum bertugas mengelola dokumen, pembukuan, dan pengarsipan desa.
2. Menjaga dokumen desa terorganisir dengan baik dan mudah diakses.
3. Memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat seperti penerbitan akta, kartu keluarga dan dokumen lain yang diperlukan kepada masyarakat.
4. Memastikan pencatatan keuangan desa, termasuk pengumpulan dan pencairan uang desa, dilakukan secara akurat dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Bertanggung jawab terhadap pendaftaran dan pengelolaan aset desa seperti tanah, bangunan, kendaraan dan fasilitas umum lainnya.
6. Mengelola pembelian barang dan fasilitas yang dibutuhkan desa, seperti peralatan kantor, perlengkapan umum, dan pemeliharaan fasilitas desa.

7. Mengatur staf administrasi yang bekerja di kantor desa, termasuk mengatur kehadiran di sekolah dan membayar gaji.
8. Membuat laporan berkala kepada kepala desa atau pemerintah setempat mengenai kegiatan administrasi, keuangan, dan harta benda desa.
9. Memberikan informasi dan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi administratif atau layanan publik lainnya.
10. Berkoordinasi dengan departemen atau lembaga terkait di tingkat desa, kabupaten atau provinsi untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku.

4.1.4.5. Kaur Keuangan

Tugas dan tanggung jawab Kaur Keuangan Desa adalah mengelola dan mengawasi aspek keuangan desa. Peran ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan keuangan dan menjamin efisiensi penggunaan dana desa. Berikut tugas dan tanggung jawab umum Kaur keuangan desa Tetelesi I:

1. Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa, meliputi pemasukan, pengeluaran dan pencatatan transaksi keuangan desa.
2. Membantu penganggaran desa termasuk perkiraan pendapatan dan rencana belanja untuk tahun anggaran mendatang.
3. Menyiapkan laporan keuangan desa bulanan, triwulanan dan tahunan dan mengirimkannya kepada pemerintah daerah dan instansi terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Mengelola dokumen keuangan seperti bukti pengeluaran, kwitansi dan *invoice*. Hal ini melibatkan pencatatan yang akurat dan penyimpanan yang aman.
5. Bertanggung jawab melakukan pembayaran yang sah sesuai anggaran desa dan mengatur pencairan dana desa sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
6. Memantau dan mendata aset desa seperti tanah, bangunan, dan fasilitas umum lainnya, serta melakukan inventarisasi secara berkala.

7. Memastikan seluruh kegiatan keuangan desa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari kemungkinan penipuan atau penyalahgunaan keuangan.
8. Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Ombudsman, untuk pemeriksaan desa dan pemeriksaan keuangan.
9. Bertanggung jawab menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa bagi pemangku kepentingan seperti masyarakat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
10. Berpartisipasi dalam pertemuan dan diskusi desa untuk memberikan informasi keuangan yang relevan dan mendukung pengambilan keputusan desa.

4.1.4.6. Kaur Perencanaan

Kaur perencanaan merupakan salah satu jabatan dalam pemerintahan desa yang mempunyai tanggung jawab besar dalam mengelola perencanaan pembangunan di tingkat desa. Tugas dan tanggung jawab seorang kaur perencanaan desa Tetehosi I, dapat mencakup:

1. Mengelola seluruh kegiatan perencanaan pembangunan di desa. Hal ini mencakup pengumpulan data, analisis kebutuhan dan permasalahan desa, serta pengembangan rencana pembangunan jangka pendek dan jangka panjang.
2. Menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan seperti rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP). Rencana ini harus mencakup beberapa bidang pembangunan seperti infrastruktur, ekonomi, sosial dan lingkungan.
3. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, antara lain pemerintah kabupaten/kota, instansi pemerintah terkait, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat setempat, dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan yang direncanakan. Hal ini untuk memastikan program-

program tersebut terlaksana sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diinginkan.

5. Mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan pembangunan desa. Data ini berfungsi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan perencanaan yang lebih baik.
6. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat - Dalam rangka menjalankan tugasnya, Kepala Perencana Desa juga dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat desa tentang program pembangunan yang ada, pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan bagaimana masyarakat dapat berkontribusi dalam pembangunan desa.
7. Menyiapkan laporan berkala mengenai kemajuan pembangunan bagi pemerintah desa dan melaporkan kemajuan tersebut kepada pemerintah kabupaten/kota.
8. Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan perencanaan dan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Hal ini mencakup administrasi, pengelolaan anggaran dan otorisasi yang diperlukan.

4.1.4.7. Seksi Pemerintahan

Perlu diingat bahwa tugas dan tanggung jawab seksi pemerintahan desa dapat berbeda-beda, tergantung pada peraturan yang berlaku di suatu daerah dan struktur pemerintahan desa. Namun secara umum, seksi pemerintah desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pelaksanaan berbagai aspek pemerintahan di tingkat desa. Di bawah ini adalah tugas dan tanggung jawab umum departemen pengelolaan desa seperti seksi Pemerintahan Desa Tetelesi I:

1. Mengkoordinasikan berbagai kegiatan pemerintahan di desa, termasuk pertemuan pemerintah, pertemuan dengan warga, dan koordinasi dengan departemen pemerintah lainnya.
2. Membantu dalam pengambilan keputusan dan pengambilan kebijakan desa yang berkaitan dengan pemerintahan. Setelah keputusan dibuat,

mereka harus memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan dengan benar.

3. Mencatat seluruh kegiatan pemerintahan yang berlangsung di desa, termasuk keputusan-keputusan penting, anggaran dan keuangan desa. Selain itu, mereka juga harus memberikan laporan berkala kepada pihak berwenang mengenai perkembangan pemerintahan desa.
4. Membantu menjaga hubungan baik antara pemerintah desa dan masyarakat setempat. Hal ini mencakup mendengarkan keluhan dan saran warga serta mengkomunikasikan kepada mereka mengenai program dan kebijakan yang sedang berjalan di desa.
5. Bertanggung jawab mengelola dokumen resmi pemerintah desa, termasuk berkas dan dokumen penting lainnya. Hal ini mencakup pemeliharaan data jumlah penduduk, tanah, dan keuangan desa.
6. Menyelenggarakan pemilihan kepala desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anda harus memastikan bahwa pemilu berlangsung adil dan transparan.
7. mengatasi konflik dan permasalahan kecil di tingkat desa.
8. Berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk desa dan memajukan desa secara keseluruhan.
9. Memberi pelayanan administrasi kepada penduduk desa, seperti penerbitan dokumen kependudukan, izin dan pelayanan lain yang berkaitan dengan pemerintahan desa.

4.1.4.8. Seksi Kesejahteraan

Tugas dan tanggung jawab Seksi Kesejahteraan Desa, bergantung pada peraturan dan kebijakan yang berlaku di daerah. Namun secara umum, beberapa tugas dan tanggung jawab bagian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data kependudukan di desa, mencatat kelahiran, kematian dan perubahan status kependudukan dan menyimpan data tersebut sesuai kebutuhan.

2. Menyalurkan bantuan sosial kepada warga desa yang membutuhkan, seperti program bantuan pangan, bantuan pendidikan, dan program kesejahteraan lainnya.
3. Memantau status kesejahteraan masyarakat desa, termasuk kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya.
4. Menyelenggarakan kegiatan dan program sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti Pelatihan keterampilan, nasihat kesehatan, dll.
5. Manajemen berbagai kasus sosial, seperti Konflik keluarga, masalah kesejahteraan anak atau masalah sosial lainnya. Hal ini dapat berupa mediasi, dukungan atau rujukan ke lembaga yang sesuai.
6. Memastikan program pembangunan di desa terlaksana sesuai rencana dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.
7. Menyiapkan catatan dan laporan berkalamengenai semua kegiatan yang dilakukan oleh bagian ini, termasuk laporan kegiatan, anggaran dan dokumen terkait.
8. Menjalin kerjasama dengan pihak luar seperti pemerintah kabupaten/kota, lembaga sosial dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung program kesejahteraan dan pembangunan desa.
9. Bertanggung jawab mengelola anggaran program sosial dan kesejahteraan desa, termasuk penganggaran dan pelaporan keuangan.
10. Memberikan dukungan kepada masyarakat dalam mengakses layanan yang tersedia dan memberikan bantuan serta informasi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

4.1.4.9. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan Desa merupakan bagian dari pemerintahan desa yang mempunyai tugas dan tanggung jawab khusus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa. Berikut ini adalah beberapa tugas dan tanggung jawab yang mungkin dimiliki oleh seksi pelayanan desa Tetehosi I:

1. Melakukan pencatatan dan pencatatan penduduk desa, termasuk kelahiran, kematian, perkawinan, dan migrasi. Hal ini termasuk memelihara database populasi yang akurat.
2. Menerbitkan dokumen penting seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran serta bantuan pengurusan dokumen tersebut.
3. Memberikan pelayanan administrasi kepada penduduk desa, seperti B. Penerbitan surat keterangan tempat tinggal, surat keterangan cacat, surat keterangan usaha, dll.
4. Mendukung penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat desa, termasuk pendirian TPS dan prosedur administrasi terkait pemilihan kepala atau wakil desa.
5. Bertanggung jawab atas penatausahaan arsip desa, termasuk dokumen administrasi, piagam penting dan data kependudukan.
6. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, misalnya. Pelatihan, penyuluhan atau pendampingan untuk meningkatkan pemahaman warga mengenai hak dan prosedur administrasinya.
7. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, serta instansi terkait lainnya dalam melaksanakan tugas dan pelayanan desa.
8. Membuat laporan rutin kepada kepala desa atau pejabat tinggi desa mengenai data demografi, kemajuan pengelolaan desa, dan permasalahan yang perlu diselesaikan.
9. Mendukung kegiatan-kegiatan di tingkat desa yang berkaitan dengan pelayanan dan administrasi.
10. Melindungi kerahasiaan informasi pribadi warga dan memastikan informasi sensitif tidak disalahgunakan.

4.1.4.10. Kepala Dusun

Tugas dan tanggung jawab seorang Kepala Dusun di Desa Tetehosi I, seperti di banyak desa di Indonesia, dapat bervariasi sesuai dengan

peraturan dan kebijakan yang berlaku di wilayah tersebut. Namun, secara umum, tugas dan tanggung jawab seorang Kepala Dusun Desa Tetehosi I adalah sebagai berikut:

1. Memastikan kelancaran administrasi dusun, termasuk pendataan penduduk, pemutakhiran data, dan pengarsipan dokumen penting.
2. Melakukan pemantauan terhadap kondisi dan perkembangan di dusun, termasuk masalah sosial, ekonomi, dan infrastruktur.
3. Perantara antara warga dusun dengan pemerintah desa atau tingkat yang lebih tinggi, serta mengkomunikasikan masukan dan kebutuhan warga.
4. Bertanggung jawab atas pengelolaan dana dusun, termasuk pemungutan pajak kecil, penggunaan dana untuk proyek-proyek pembangunan, dan pelaporan pengeluaran.
5. Memantau dan mengawasi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dusun, seperti jalan, saluran air, dan fasilitas umum lainnya.
6. Memberikan penyuluhan kepada warga dusun tentang berbagai program pemerintah, hak, kewajiban, dan informasi penting lainnya.
7. Membantu dalam penyelesaian konflik antarwarga atau masalah-masalah sosial yang mungkin timbul di dusun.
8. Berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat untuk menjaga ketertiban dan keamanan di dusun.
9. Membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dusun, termasuk pengembangan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.
10. Mengorganisir dan mengawasi pemilihan umum kepala dusun dan pengurus dusun lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.1.4.11. Staf pemerintahan Desa

Tugas dan tanggung jawab aparaturnya pemerintahan desa di Tetehosi I atau di desa lainnya dapat berbeda-beda, tergantung pada struktur dan peraturan pemerintahan desa. Namun secara umum, terdapat tugas dan

tanggung jawab berikut ini, yang biasanya diemban oleh staf pemerintahan desa Tetehosi I:

1. Melayani warga desa dan memberikan informasi tentang berbagai layanan dan program pemerintah.
2. Menerima dan menangani pengaduan atau pengaduan masyarakat.
3. Memberikan dukungan administratif kepada warga negara dalam mengakses pelayanan pemerintah.
4. Penyelesaian tugas administrasi umum, misalnya registrasi data kependudukan, kependudukan dan penguasaan lahan.
5. Pengelolaan dokumen dan arsip desa.
6. Membantu mempersiapkan pertemuan desa dan mencatat hasilnya.
7. Membantu pengelolaan keuangan desa, termasuk menghimpun dan mencatat pendapatan dan pengeluaran desa yang sah.
8. Mengelola gaji dan tunjangan staf desa.
9. Mendukung pelaksanaan program pembangunan desa.
10. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

4.2. Hasil dan Pembahasan

4.2.1. Kondisi Eksistin Indikator Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243), peran adalah elemen dinamis kedudukan (status), dan seseorang menjalankan suatu peranan jika ia melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan itu. Setiap orang dalam sebuah organisasi memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban, atau tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi atau lembaga. Berikut indikator Peran yang dilakukan oleh Kepala Desa Tetehosi I Kota Gunungsitoli:

a. Peran Antar Pribadi (*Interpersonal Role*)

Kumpulan ide dan pemahaman tentang bagaimana orang berinteraksi, berkomunikasi, dan memainkan peran yang berbeda dalam hubungan antar pribadi disebut sebagai teori indikator peran antar pribadi. Menurut Minzberg dalam buku Pengantar Manajemen Dan buku Kepemimpinan Dalam Manajemen yang di tulis oleh Siswanto dan Miftah

Thoha (2012: 21) Agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar, atasan harus bertindak sebagai tokoh, pemimpin, dan penghubung dalam peran antarpribadi. Minzberg menyoroti betapa pentingnya keterampilan komunikasi dan peran antarpribadi dalam kepemimpinan dan manajemen. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan pemahaman tentang kompleksitas tugas seorang pemimpin sangat penting untuk keberhasilan pemimpin.

Berdasarkan uraian teori diatas, maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Elberta Zebua Pada hari sabtu tanggal 08 September 2023 pukul 16:51 di kantor desa sebagai Pj. Kepala desa Tetelesi I

“Peran saya dalam melakukan interaksi sebagai Pj. Kepala desa tentunya sudah terlaksana dengan baik, dimana saya selalu menghadiri acara-acara formal maupun non formal ketika ada undangan pasti saya akan hadir. Interaksi dengan kelembagaan desa tetelesi I cukup berjalan dengan baik terutama bisa kita lihat dalam pelaksanaan-pelaksanaan di desa kita ini selalu melibatkan setiap unsur mitra kerja baik itu BPD, LPM, dan lembaga-lembaga lainnya. Cara saya berinteraksi dengan kelembagaan yang ada di desa yaitu menyampaikan kepada mereka bahwasannya pemerintahan desa itu mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa terkait dengan tupoksi dalam hal pengambilan keputusan, tentunya dengan melakukan musyawarah mufakat antara pemerintah desa dengan mitra kerja BPD, serta lembaga lainnya yang ada di desa tetelesi I. dalam melaksanakan interaksi dengan kelembagaan sampai saat ini tidak ada kendala.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti juga mewawancarai Bapak Yang Setia Zebua sebagai kasi pelayanan di Desa Tetelesi I pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 pukul 10:35 WIB di kantor desa Tetelesi I dimana hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Sepanjang Pj. Kepala desa ini bertugas dari bulan November 2022 beliau sangat antusias dalam menghadiri secara langsung setiap acara formal di desa seperti acara nikah, duka dan kegiatan lain, meskipun beliau memiliki tugas di tempat kerjanya, namun beliau selalu memberikan waktu untuk

menghadiri kegiatan tersebut. Interaksi kepala desa cukup luar biasa, sampai saat ini hubungan kades dengan lembaga desa cukup baik, beliau selalu memberikan saran, solusi dan juga teguran ketika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh kelembagaan dan juga aparat desa. Beliau juga selalu mendukung setiap kegiatan-kegiatan kelembagaan di desa Tetelesi I ini. Salah satu masalah yang kami hadapi adalah kurangnya partisipasi aktif dari beberapa lembaga di desa; beberapa dari mereka kurang responsif terhadap perubahan dan tidak aktif dalam memberikan pendapat. Selain itu, ada masalah dengan pemahaman masyarakat tentang kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah desa. Namun masalah tersebut telah kita usahakan untuk bisa mencari solusi, sehingga semua lembaga dapat berpartisipasi aktif dalam membahas hal-hal yang dapat membawa perubahan positif di desa kita.”

Berdasarkan Hasil wawancara dari kedua informan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pj. Kepala Desa, yang menjabat sejak November 2022, sangat antusias dan aktif dalam menjalankan peran individu dalam pemerintahan desa. Dia menjaga hubungan baik dengan lembaga desa, memberikan saran, solusi, dan teguran saat diperlukan, dan mendukung kegiatan kelembagaan. Dia juga secara teratur hadir dalam berbagai acara formal dan non-formal di desa. Terdapat upaya untuk mencari solusi untuk beberapa masalah, seperti kurangnya partisipasi aktif beberapa lembaga dan pemahaman masyarakat tentang kebijakan. Kepala desa telah membangun hubungan yang kuat dengan lembaga desa dan berpartisipasi aktif dalam memastikan koordinasi dan partisipasi yang baik untuk mencapai perbaikan di Tetelesi I.

Selanjutnya peneliti ingin menguatkan dengan melakukan observasi di Desa Tetelesi I. Hasil observasi menunjukkan bahwa ada beberapa hambatan yang perlu diperbaiki, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan yang diberikan, terdapat hambatan dalam komunikasi antara Pj. Kepala Desa, masyarakat, dan beberapa lembaga di Desa Tetelesi I. Salah satu hambatan utama adalah masyarakat dan lembaga terkadang tidak memahami kebijakan yang diberikan. Meskipun Pj. Kepala Desa telah mencoba menawarkan solusi, komunikasi yang

kurang efektif menyebabkan masyarakat kesulitan memahami kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti yaitu wawancara dan observasi, maka peneliti menarik kesimpulan berdasarkan indikator peran antar pribadi Pj. Kepala Desa sangat aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala desa. Dia mendukung kegiatan kelembagaan, menjaga hubungan baik dengan lembaga, dan memberikan saran, solusi, dan teguran yang diperlukan. Tetapi masih ada beberapa masalah yang perlu diperbaiki, salah satunya yaitu masyarakat dan beberapa lembaga desa kurang memahami kebijakan yang diberikan oleh Pj. Kepala Desa. Untuk memperbaiki hal tersebut, Pj. Kepala desa harus memastikan bahwa masyarakat dan lembaga berpartisipasi secara aktif serta memahami maksud dari kebijakan yang diberikan agar kerjasama bisa lebih baik. Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian oleh Muhammad Kholish Hanif (2018) dimana dikatakan bahwa peran pemimpin sangat penting dalam mendorong produktivitas anggota.

b. Peranan yang Berhubungan dengan Informasi (*Information Role*)

Seorang pemimpin dapat mendapatkan informasi penting dari orang-orang di luar organisasinya dan menyimpannya untuk organisasi. Oleh karena itu, Mintzberg (2012) merancang peran pemimpin yang berkaitan dengan informasi untuk peran kedua. Mereka berfungsi sebagai pengamat (*Monitor*), penyampai (*Disseminator*), dan pembicara (*Spokesman*).

Berdasarkan uraian teori diatas, maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Elberta Zebua Pada hari sabtu tanggal 08 September 2023 pukul 16:51 di kantor desa sebagai Pj. Kepala desa Tetelesi I

“Tentunya dalam pelaksanaan kegiatan kelembagaan ini saya sebagai Pj. Kepala Desa wajib mengikuti pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan setiap lembaga, pemerintah desa turut hadir untuk memantau dan melihat apakah berjalan sesuai dengan prosedur atau tidak. Saya langsung datang kelapangan untuk memastikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut. Dalam proses penyampaian informasi sudah baik, dalam arti setiap kegiatan yang akan dilaksanakan akan kita sampaikan kepada masyarakat melalui kepala dusun baik secara lisan maupun tulisan serta di balai desa kita memberikan informasi di papan informasi, jadi setiap ada kegiatan yang akan dikerjakan akan di cantumkan di papan informasi, terkait dengan pelaksanaan pekerjaan. Contohnya ketika ada pembangunan, kita menginformasikan di papan informasi tentang perekrutan masyarakat untuk dapat ikut serta dalam kegiatan pembangunan. Sampai saat ini saya rasa tidak ada kendala dalam penyampaian informasi.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti juga mewawancarai Bapak Faevman Gea pada hari Senin tanggal 11 September 2023 pukul 10:40 WIB, sebagai Direktur BUMDes Tetelesi I

“Tentunya sudah menjadi kewajiban dari Pj. Kepala desa dalam memantau, mengawasi dan mengevaluasi setiap kegiatan dari kelembagaan, saya sebagai direktur BUMDes, beliau selalu memberikan dorongan mengawasi memberikan saran supaya dapat lebih maju kedepan, BUMDes sampai saat ini telah berjalan dengan baik. Cara beliau dalam memantau, yaitu dia selalu meminta laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan, bagaimana hasilnya. Sehingga dari hasil tersebut dia akan mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kelembagaan yang bersangkutan. Yang menjadi penghambat informasi sampai saat ini dari kepala desa tidak ada penghambat, namun penghambat biasanya dari aparat desa dimana dalam memberikan informasi terkadang lalai dan tidak cepat dalam menyebarkan informasi kepada lembaga.”

Berdasarkan Hasil wawancara dari kedua informan diatas, dapat disimpulkan bahwa komitmen Pj. Kepala Desa selalu memastikan setiap kegiatan organisasi berjalan lancar serta memberikan informasi diberikan dengan transparan kepada masyarakat dan lembaga. Untuk pembangunan dan pengelolaan kelembagaan yang lebih efisien di tingkat desa, dia

melakukan upaya aktif untuk mengawasi dan memantau, serta berkomunikasi dengan masyarakat serta lembaga dengan baik.

Selanjutnya peneliti ingin menguatkan dengan melakukan observasi di Desa Tetehosi I. Hasil observasi ditemukan bahwa kelembaga desa (BPD, LPM, PKK, dan BUMDes) sering mengalami keterlambatan informasi, lembaga-lembaga ini seringkali tidak menerima hasil keputusan atau rencana kegiatan penting dengan cepat. Hal ini dapat mengganggu perencanaan dan kolaborasi di tingkat kelembagaan desa Tetehosi I.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti yaitu wawancara dan observasi, maka peneliti menarik kesimpulan berdasarkan indikator peran yang berhubungan dengan informasi yaitu Pj. Kepala Desa di Desa Tetehosi I memiliki peran yang kuat dalam memastikan kelancaran kegiatan organisasi serta transparansi informasi kepada masyarakat dan lembaga. Namun, informasi tidak selalu cepat disampaikan kepada lembaga desa seperti BPD, LPM, PKK, dan BUMDes. Akibatnya, mereka seringkali menunggu lama untuk menerima keputusan atau rencana kegiatan penting. Ini dapat menghambat kolaborasi dan perencanaan di tingkat kelembagaan desa. Oleh karena itu, untuk membuat pengelolaan kelembagaan desa lebih efektif dan efisien, komunikasi dan penyebaran informasi serta sarana dan prasarana harus ditingkatkan. Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian oleh Didik Julian (2021) dikatakan bahwa Kepala desa harus terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat sesuai kebutuhan, antara lain dengan meningkatkan elemen atau komponen yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan, seperti peningkatan sarana dan prasarana. Mereka juga harus berusaha memberikan pelayanan informasi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

c. Peranan Pengambil Keputusan (*Decisional Role*)

Pada dasarnya, pengambilan keputusan adalah proses memilih beberapa pilihan yang paling penting bagi pemimpin birokrasi karena sangat penting untuk komunikasi, koordinasi, memotivasi, dan mengubah organisasi. Menurut Salusu (2016), pengambilan keputusan adalah "proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai situasi. Proses itu menemukan dan menyelesaikan masalah organisasi." Indikator peran pengambil keputusan mengacu pada tanda-tanda atau karakteristik yang dapat diamati dalam perilaku pengambil keputusan dan pengambilan keputusan, yang menunjukkan peran mereka dalam organisasi.

Berdasarkan uraian teori diatas, maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Elberta Zebua Pada hari sabtu tanggal 08 September 2023 pukul 16:51 di kantor desa sebagai Pj. Kepala desa Tetelesi I

“Memutuskan sesuatu tentunya dalam hal pelaksanaan tugas, kita selalu mengadakan rapat atau pertemuan dengan lembaga, kita bicarakan berapa kira-kira kebutuhan yang realistis digunakan pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Maka pemerintah desa juga berperan mengambil keputusan dalam arti contohnya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di rasa masuk akal, sesuai aturan atau realistis biaya-biaya yang diperlukan, maka kita mempertimbangkan juga dalam rencana belanja dalam arti kita berikan mereka kesempatan menjalankan kegiatan mereka dengan penuh rasa tanggungjawab atau sesuai dengan regulasi yang berlaku. Saya rasa sampai saat ini tidak ada kendala dalam pengambilan keputusan, jika memang ada kendala dalam pengambilan keputusan, tentunya kita akan bawakan di forum, kita akan memberikan kesempatan kepada seluruh peserta forum baik tokoh masyarakat, tokoh pemuda, BPD, serta mitra kerja lain untuk memberi sumbangsi pemikiran. Tentunya dalam pengambilan keputusan ada yang pro dan kontra baik dalam hal perancangan kegiatan contohnya dalam hal pembangunan ada yang mengusulkan untuk melakukan pembangunan di dusun I, ad juga perbedaan pendapat maunya di dusun lain, maka kita mengambil jalan tengah/ kebijakan bedardasarkan kesepakatan dari beberapa pihak, jika kita melihat di dusun tersebut sebelumnya telah mendapat dana pembangunan dengan dana yang besar maka kita akan berikan saran atau kita

tegaskan pada saat itu juga untuk menyampaikan bahwasannya di dusun yang lain juga butuh untuk diberikan dana pembangunan atau kita naikkan biaya yang sebelumnya dananya kecil.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti juga mewawancarai Bapak Faevman Gea pada hari Senin tanggal 11 September 2023 pukul 10:40 WIB, sebagai Direktur BUMDes Tetelesi I

“Dalam setiap keputusan rapat, untuk rapat umum yang dipimpin oleh BPD yang memutuskan tetap kepala desa, tapi dia selalu menerima terlebih dahulu saran dan pendapat dari peserta rapat apakah usul atau saran yang disampaikan kelembagaan dapat diterima oleh seluruh peserta forum, apakah keputusan tersebut tidak menimbulkan masalah dikemudian hari dari keputusan tersebut, serta beliau selalu memutuskan sesuatu dengan penuh kehati-hatian dia selalu bekerjasama dengan pimpinan-pimpinan kelembagaan yang artinya dia tidak sembarangan membuat keputusan, namun dia tetap kembalikan kepada forum. Setiap pimpinan pasti mempunyai kendala dalam melaksanakan program pemerintahan ini, dimana salah satu kendala yang saya ketahui yaitu ketika ada pertemuan rapat, orang-orang yang kita harapkan hadir sebenarnya kadang tidak hadir dan soal untuk berpartisipasi dalam ikut serta tanpa adanya imbalan jasa kadang-kadang masyarakat kita susah diajak, serta ketidaktepatan waktu dalam menghadiri pertemuan dimana kepala desa dan aparat lainnya selalu hadir tepat waktu, tetapi peserta rapat yang membuat lama dalam pelaksanaan rapat. Salah satu solusinya yaitu harus tepat waktu dalam memulai pertemuan-pertemuan, meskipun yang hadir hanya beberapa orang saja, sehingga kedepan orang-orang yang sering datang terlambat akan mulai disiplin dalam memanfaatkan waktu untuk pertemuan. Bagaimanapun hasil keputusan musyawarah tersebut, yang telah ditetapkan oleh kepala desa wajib diterima oleh seluruh masyarakat maupun lembaga, karena yang memutuskan bukan hanya kepala desa.”

Berdasarkan Hasil wawancara dari kedua informan diatas, dapat disimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan di pemerintahan desa Tetelesi I berjalan dengan baik, dengan masyarakat dan lembaga desa terlibat aktif dalam pengambilan keputusan, dan dengan

mempertimbangkan kebijakan dan pertimbangan realistis untuk mencapai tujuan pembangunan desa.

Selanjutnya peneliti ingin menguatkan dengan melakukan observasi di Desa Tetehosi I. Observasi ini dilakukan untuk memahami peran pengambilan keputusan, khususnya kepala desa, dalam mengelola kerjasama kelembagaan yang inklusif di Desa Tetehosi I. hasil observasinya adalah meskipun beberapa masyarakat dan lembaga terlibat dalam proses ini, mayoritas masyarakat tidak aktif terlibat dan tidak memahami proses pembuatan keputusan dengan baik. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam forum keputusan desa. Ini akan memungkinkan lebih banyak orang untuk terlibat dan memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan yang lebih demokratis.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti yaitu wawancara dan observasi, maka peneliti menarik kesimpulan berdasarkan indikator peran pengambilan keputusan yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan pemerintahan desa secara umum berjalan dengan baik, melibatkan masyarakat dan lembaga desa dalam mempertimbangkan kebijakan dan pertimbangan realistis untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Namun, penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tidak aktif terlibat dalam proses pembuatan keputusan dan tidak memahaminya dengan baik. Oleh karena itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat dan lembaga desa dalam forum keputusan desa harus ditingkatkan agar proses pengambilan keputusan menjadi lebih transparan dan inklusif. Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian oleh Ava Swastika Fahriana tahun (2018) dimana dikatakan bahwa Keputusan yang tegas, cepat dan rasional yang akan menghantarkan sebuah organisasi itu mencapai keberhasilan serta kemajuan.

4.2.2. Kondisi Eksistin Indikator Kerjasama

Menurut Putri Handayani, (dalam Fitra Indah, 2022) "Kerjasama merupakan sinergisitas kekuatan dari beberapa orang dalam mencapai satu tujuan

yang diinginkan. Kerjasama akan menyatukan kekuatan ide-ide yang akan mengantarkan pada kesuksesan”. Berikut indikator Kerjasama yang dilakukan oleh Kepala Desa Tetehosi I Kota Gunungsitoli:

a. Fokus Pada Tujuan

Teori fokus tujuan adalah konsep yang membahas pengaruh dan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dan pasti dalam mencapai hasil yang diinginkan. Individu atau kelompok dengan tujuan yang jelas cenderung lebih fokus, termotivasi, dan bertekad dalam tindakan dan usahanya. Teori ini berpendapat bahwa tujuan tidak hanya memiliki arah yang tetap tetapi juga memiliki efek psikologis dan perilaku yang signifikan. Tujuan adalah "sebuah target dalam periode tertentu", menurut Edison et al. (2018:31). Tujuan jangka panjang berasal dari hasil perumusan strategis, sedangkan tujuan jangka pendek dibentuk oleh program tahunan untuk mendukung tujuan jangka panjang.

Berdasarkan uraian teori diatas, maka peneliti melakukan wawancara dengan bapak Yang Setia Zebua pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 pukul 10:35 WIB di kantor desa Tetehosi I dimana hasil wawancaranya sbb:

“Selama ini Pj. Kepala desa orangnya energik karena masih muda jadi untuk mencapai target selalu fokus karena di dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sudah menjadi kesepakatan dalam hal pembangunan, pemberdayaan, pembinaan masyarakat dan penanggulangan bencana kita selalu melaksanakannya secara bersama sama sehingga fokus kita dalam mencapai target bisa terwujud. Langkah yang dilakukan yaitu dengan melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan pemerintah mulai dari tahap RKPD selanjutnya persetujuan dari BPD baru kita menetapkan prioritas utama yang akan dilaksanakan serta disesuaikan dengan anggaran, setelah kegiatan terlaksana kita akan melakukan transparansi dana yang digunakan kepada masyarakat melalui baliho. Tahap-tahap itu kita jalani agar tidak menyalahi regulasi yang ada.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti juga mewawancarai Bapak Foarota Zamasi pada hari senin tanggal 11 September 2023 pukul 18:06 WIB, sebagai Ketua LPM Desa Tetelesi I

“Kepala desa selalu berpedoman pada tingkat kecamatan bagaimana petunjuk dari atas dan sejauh ini ada hambatan karena program ini adalah program pemerintah, maka dia juga hati-hati dalam melaksanakannya. Saya melihat kepala desa kali ini tidak ingin ada masalah dalam pelaksanaan kegiatan secara terburu-buru. Strategi kepala desa dia mengambil pendapat dan ide kepada tokoh masyarakat dan juga kelembagaan dalam memberikan masukan dan gagasan, dimana masukan dan gagasan ini nantinya yang akan dipertimbangkan oleh pak kepala desa untuk dilaksanakan.”

Berdasarkan Hasil wawancara dari kedua informan diatas, dapat disimpulkan bahwa kepala desa sangat berhati-hati saat menjalankan program pemerintah dan ingin tidak ada masalah saat melakukannya. Untuk mendapatkan ide dan pendapat dari orang-orang di masyarakat dan lembaga, strateginya adalah meminta pendapat mereka untuk dipertimbangkan sebelum implementasi. Selain itu, Penjabat Kepala Desa yang saat ini menjabat adalah orang yang dinamis dan bersemangat untuk mencapai tujuan. Mereka beroperasi sesuai dengan peraturan pemerintah, mulai dari persiapan hingga transparansi penggunaan dana. Ini dilakukan untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

Selanjutnya peneliti ingin menguatkan dengan melakukan observasi di Desa Tetelesi I. Hasil observasi terhadap indikator fokus pada tujuan yang dilakukan kepala desa dalam pengelolaan kerjasama kelembagaan di desa Tetelesi I menunjukkan terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Meskipun kepala desa berkomitmen untuk mencapai tujuan kerjasama kelembagaan, namun terdapat beberapa hal yang menghambat efektivitas pelaksanaan program, salah satunya yaitu kepemimpinan yang terlalu berhati-hati, meskipun Pj. Kepala Desa menjalankan program pemerintah dengan hati-hati adalah hal yang baik, terlalu berhati-hati juga dapat menghambat kemajuan. Tampaknya Pj. Kepala Desa terlalu terkonsentrasi pada menghindari

masalah daripada mengambil tindakan untuk mencapai tujuan dengan cepat.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti yaitu wawancara dan observasi, maka peneliti menarik kesimpulan berdasarkan indikator fokus pada tujuan yaitu Sebelum menerapkan program, Pj. Kepala Desa terus meminta pendapat dari masyarakat dan lembaga untuk menghindari masalah. Namun, terlalu banyak kehati-hatian membuat program gagal berjalan dengan baik. Kadang-kadang, Pj. Kepala Desa lebih suka menghindari masalah daripada mengambil tindakan cepat untuk mencapai tujuan. Dalam situasi seperti ini, perlu ada keseimbangan yang lebih baik antara tindakan proaktif dan kehati-hatian untuk mencapai tujuan dengan efektif. Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian oleh Arif Al Muqsith (2022) dimana dikatakan supaya dapat memahami dan mengerti bagaimana visi dan misi dapat diwujudkan, maka kepala desa harus mengalokasikan dana yang diperlukan untuk memastikan bahwa visi dan misi dapat dilaksanakan secara efektif.

b. Saling Memberi Motivasi

Saling memberi motivasi adalah suatu konsep yang mengacu pada interaksi positif antara individu atau kelompok dalam lingkungan sosialnya dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi bersama dan mencapai tujuan. Konsep ini didasarkan pada asumsi bahwa dukungan, inspirasi, dan dorongan dari orang lain dapat mempengaruhi motivasi individu untuk mencapai hasil yang lebih baik. Kondisi internal yang spesifik dorongan yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku seseorang ke suatu tujuan disebut motivasi. Menurut Rahmawati (2020), motivasi adalah dorongan untuk mengatasi hambatan, menggunakan otoritas, dan berjuang untuk menyelesaikan tugas yang sulit secepat mungkin.

Berdasarkan uraian teori diatas, maka peneliti melakukan wawancara dengan bapak Yang Setia Zebua pada hari Jumat tanggal 22

September 2023 pukul 10:35 WIB di kantor desa Tetehosi I dimana hasil wawancaranya sbb:

“Tentu saja selama ini kelembagaan yang ada di desa kita ini saling mendukung dan juga memotivasi lembaga lainnya dalam melaksanakan kegiatan masing-masing lembaga. Dimana kerjasama antar lembaga ini sangat penting karena kegiatan dalam kegiatan ini jika hanya satu lembaga yang melaksanakan tentunya lembaga yang lain tidak tau kegiatan lembaga lainnya. Kegiatan kelembagaan saling mendukung, saling memberi informasi dan juga motivasi satu dengan yang lain dan juga kepada masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti juga mewawancarai bapak Viktor Bate'e sebagai anggota BPD di desa Tetehosi I pada Hari Minggu, 15 Oktober 2023 Pukul 19:18 WIB

“Kami bekerjasama dengan PKK untuk program pendidikan dan pelatihan, seperti kursus keterampilan bagi ibu-ibu di desa. Ini mendorong anggota PKK untuk terus meningkatkan keterampilan mereka. Pertemuan rutin dengan LPM membantu kami dalam merencanakan pembangunan desa. Kami mendengarkan umpan balik LPM dan berusaha menerapkan rekomendasi yang bermanfaat. Karena kami bekerjasama untuk mencapai tujuan pembangunan desa, ini adalah cara kita saling mendorong. Tantangan pasti ada, Salah satu masalah penting adalah komunikasi yang kurang efektif antara lembaga ini. Terkadang, kerjasama dapat terganggu karena perbedaan prioritas atau ketidakjelasan tentang tujuan. Namun demikian, kami terus berusaha untuk meningkatkan komunikasi dan memastikan bahwa masing-masing pihak memperoleh pemahaman yang sama.”

Berdasarkan Hasil wawancara dari kedua informan diatas, dapat disimpulkan bahwa lembaga desa saling mendorong satu sama lain. Mereka membantu satu sama lain, berbagi informasi, dan mendorong satu sama lain untuk melakukan tugas lembaga. Kerjasama antara lembaga, seperti PKK dan LPM, membantu mencapai tujuan pembangunan desa dan mendorong anggota PKK untuk meningkatkan keterampilan mereka. Namun, terkadang ada tantangan komunikasi yang menghambat kerjasama, tetapi mereka terus berusaha untuk memperbaiki komunikasi

dan memastikan semua orang memahami satu sama lain. Jadi, dalam situasi ini, motivasi yang saling menguntungkan sangat penting untuk kesuksesan kerjasama antar lembaga desa dalam mencapai tujuan pembangunan.

Selanjutnya peneliti ingin menguatkan dengan melakukan observasi di Desa Tetehosi I. Peneliti menemukan bahwa ada upaya nyata untuk menciptakan motivasi positif bagi anggota lembaga. Contohnya, dengan dukungan dari lembaga lain seperti LPM dan BPD, anggota PKK termotivasi untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang mereka laksanakan, seperti melaksanakan kursus masak, dll. Ini menunjukkan komitmen mereka untuk saling mendukung untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti yaitu wawancara dan observasi, maka peneliti menarik kesimpulan berdasarkan indikator Saling memberikan motivasi yaitu Lembaga desa di Desa Tetehosi I saling mendorong satu sama lain untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Anggota PKK dimotivasi untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam berbagai kegiatan dengan dukungan lembaga seperti LPM dan BPD. Semangat saling mendukung tetap kuat meskipun ada beberapa tantangan komunikasi. Ini menunjukkan komitmen mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik melalui kerjasama yang erat. Motivasi ini sangat penting untuk keberhasilan kerjasama antar lembaga desa dalam mencapai tujuan pembangunan. Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian oleh Dwi Iriani Margayaningsih (2019) dimana dikatakan bahwa Motivasi, baik dari pemerintah desa maupun dari diri sendiri, serta kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan melalui undang-undang dan peraturan, adalah komponen yang mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat.

c. Menjalinkan Kerjasama Sesama Tim

Kerjasama tim adalah suatu proses di mana individu-individu dengan latar belakang, keterampilan, dan pengetahuan yang berbeda bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Indikator yang mendorong

kerja tim yang efektif mencakup aspek-aspek seperti komunikasi yang baik, rasa saling percaya, peran yang jelas, dukungan tim, dan tujuan yang jelas. "Kerjasama tim adalah sekelompok orang yang memiliki kemampuan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama-sama dengan mengarahkan setiap prestasi yang dimiliki demi mencapai hasil yang lebih baik", menurut Anggraeni & Saragih (2020). Kepercayaan yang tinggi antara anggota tim cenderung meningkatkan kerjasama dan kinerja tim.

Berdasarkan uraian teori diatas, maka peneliti melakukan wawancara dengan bapak Viktor Bate'e sebagai anggota BPD di desa Tetelesi I pada Hari Minggu, 15 Oktober 2023 Pukul 19:18 WIB

"Salah satu komponen penting dalam pembangunan desa adalah menjalin kerjasama antar lembaga. Namun demikian, kami menghadapi sejumlah masalah dalam hal ini. Salah satu masalah kami adalah kurangnya komunikasi yang efektif antar lembaga desa. Seringkali, lembaga-lembaga ini bekerja secara terpisah, tanpa forum yang jelas untuk berkolaborasi. Ini sering menyebabkan tumpang tindih dalam program kami. Kami berusaha untuk mengadakan pertemuan rutin antar lembaga, tetapi seringkali kesulitan menentukan waktu yang tepat untuk masing-masing pihak dikarenakan kebanyakan dari anggota lembaga memiliki pekerjaan pokok yang harus mereka laksanakan."

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti juga mewawancarai ibu Rosmeni Larosa sebagai Bendahara TP. PKK Desa Tetelesi I, pada hari Kamis 05 Oktober 2022 pukul 19:29 WIB

"Secara umum, kerjasama antar lembaga di desa ini cukup baik, tetapi ada saat-saat ketika hal-hal tidak berjalan lancar. Ada saat-saat ketika lembaga-lembaga yang berbeda menghadapi kendala komunikasi, yang dapat menghambat pencapaian tujuan bersama. Salah satu masalah adalah kurangnya koordinasi antara PKK dan BPD. Kadang-kadang, program kami berdua saling tumpang tindih atau tidak efisien karena kurangnya informasi. Meskipun demikian, kami telah mulai mengadakan pertemuan rutin antar lembaga, tetapi hasilnya belum sebaik yang kami harapkan."

Berdasarkan Hasil wawancara dari kedua informan diatas, dapat disimpulkan bahwa kerjasama antar lembaga di desa ini umumnya baik; namun, ada kendala dalam komunikasi. Program-program lembaga tumpang tindih, yang menghambat pencapaian tujuan bersama. Meskipun upaya telah dilakukan untuk mengadakan pertemuan rutin, kesulitan menentukan waktu yang tepat seringkali menjadi penghalang. Oleh karena itu, untuk menjamin keberlanjutan dan efisiensi pembangunan desa, diperlukan tindakan yang lebih khusus untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar lembaga desa.

Selanjutnya peneliti ingin menguatkan dengan melakukan observasi di Desa Tetehosi I. Dimana hasil observasi ditemukan bahwa masih terdapat kurangnya keterlibatan aktif anggota tim dari berbagai lembaga, tampak beberapa dari anggota kelembagaan kurang terlibat aktif dalam proses kerjasama. Ini dikarenakan mereka memiliki pekerjaan yang tidak dapat dielakkan, sehingga dalam pelaksanaan kerjasama mereka tidak dapat hadir.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti yaitu wawancara dan observasi, maka peneliti menarik kesimpulan berdasarkan indikator menjalin kerjasama sesama tim yaitu Semua lembaga di desa ini bekerjasama dengan baik, tetapi ada hambatan dalam komunikasi dan partisipasi tim yang aktif. Meskipun upaya telah dilakukan untuk mengadakan pertemuan secara teratur, masalah menentukan waktu yang tepat sering menjadi penghalang dikarenakan beberapa anggota lembaga memiliki pekerjaan lain yang tidak dapat dielakkan. Tindakan konkret harus diambil untuk meningkatkan komunikasi dan keterlibatan aktif anggota tim dari berbagai lembaga agar lembaga dapat bekerjasama lebih baik dan mencapai tujuan pemerintahan desa dengan lebih efisien. Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian oleh Iin Endah Setyawati (2022) dikatakan bahwa meningkatkan komunikasi dan kerjasama serta memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak melaksanakan tugas adalah beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini.

d. Koordinasi dalam Proses Menyelesaikan Tugas

Koordinasi menjelaskan bagaimana individu atau kelompok bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu tugas atau proyek. Koordinasi adalah proses pengorganisasian, pengorganisasian, dan pengumpulan upaya-upaya individu atau kelompok yang berbeda untuk bekerjasama secara efektif. Menurut Handoko (2012: 195), koordinasi adalah proses penggabungan tujuan dan kegiatan pada satuan organisasi yang berbeda (departemen atau bidang fungsional) untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Menurut pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (sebanding dalam posisi atau urutan, bukan subordinasi) untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal-hal tertentu. Secara normatif, koordinasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggerakkan, menyasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan yang spesifik atau berbeda untuk mencapai tujuan yang sama.

Berdasarkan uraian teori diatas, maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Elberta Zebua Pada hari sabtu tanggal 08 September 2023 pukul 16:51 di kantor desa sebagai Pj. Kepala desa Tetelesi I

“Saya melihat bahwa koordinasi antar lembaga di desa kita telah berkembang dengan cara yang baik, dimana untuk mencapai tujuan pemerintahan, koordinasi kelembagaan desa kita sangat penting. Kami selalu memantau bagaimana organisasi mengelola sumber daya mereka. Ada kemungkinan bahwa koordinasi perlu diperbaiki jika ada tumpang tindih atau tindakan yang tidak efektif. Saya selalu berusaha menjadi penghubung antara lembaga desa, memastikan bahwa mereka berkomunikasi satu sama lain, dan memecahkan konflik jika ada. Saya juga berperan dalam menginisiasi pertemuan koordinasi rutin antara lembaga-lembaga tersebut agar mereka dapat saling berbagi informasi, menyinkronkan rencana, dan menentukan wilayah di mana mereka dapat bekerjasama.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti juga mewawancarai ibu Rosmeni Larosa sebagai Bendahara TP. PKK Desa Tetelesi I, pada hari Kamis 05 Oktober 2022 pukul 19:29 WIB

“Di Desa Tetelesi I, hubungan antara BPD, PKK, LPM, dan BUMDes relatif baik. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kami saling mendukung dan bekerjasama dalam berbagai kegiatan. Kami dari PKK sering mengadakan pelatihan dan workshop tentang pengelolaan usaha untuk anggota BUMDes. Kami juga aktif berpartisipasi dalam program yang diinisiasi oleh BPD dan LPM, seperti kegiatan sosial dan lingkungan. Selain itu, kami menghadapi kesulitan dalam mengatur waktu. Terkadang sulit untuk menemukan waktu yang tepat untuk pertemuan semua lembaga. Kami telah mencoba untuk menjadi lebih fleksibel dalam menjadwalkan pertemuan dan berkomunikasi secara teratur melalui grup WhatsApp, yang telah membantu koordinasi antar lembaga menjadi lebih baik.”

Berdasarkan Hasil wawancara dari kedua informan diatas, dapat disimpulkan bahwa koordinasi antar lembaga di Desa Tetelesi I telah berkembang dengan baik dan sangat penting untuk mencapai tujuan pemerintah. Untuk mendukung koordinasi, lembaga seperti BPD, PKK, LPM, dan BUMDes bekerjasama dan mendukung satu sama lain, serta mengadakan pertemuan koordinasi rutin. Meskipun hubungannya relatif baik, kesulitan mengatur waktu untuk pertemuan masih ada, tetapi masalah ini telah diselesaikan dengan fleksibilitas dalam jadwal dan komunikasi yang teratur melalui grup WhatsApp. Oleh karena itu, desa ini telah berhasil meningkatkan koordinasi lembaga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya peneliti ingin menguatkan dengan melakukan observasi di Desa Tetelesi I. Dengan hasil observasi ditemukan bahwa terdapat perbedaan prioritas antara lembaga-lembaga desa, yang dapat menghambat proses koordinasi. Sementara lembaga tertentu berkonsentrasi pada satu aspek pembangunan, lembaga lain memiliki fokus yang berbeda. Contohnya, LPM berkonsentrasi pada pelaksanaan program gotongroyong, sedangkan PKK mengadakan kursus memasak

bagi ibu-ibu pada hari yang sama. sehingga koordinasi antar lembaga tidak optimal. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih efisien dan efektif, anggota lembaga desa harus bekerjasama dan berkomunikasi lebih baik satu sama lain.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti yaitu wawancara dan observasi, maka peneliti menarik kesimpulan berdasarkan indikator koordinasi dalam proses menyelesaikan tugas dimana koordinasi antar lembaga di desa Tetelesi I telah berkembang dengan baik, tetapi ada perbedaan prioritas yang menghambat proses. Meskipun lembaga desa bekerjasama dan selalu melaksanakan pertemuan, perbedaan fokus dan kegiatan dapat mengganggu koordinasi yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan koordinasi antara lembaga desa untuk mempermudah dalam mencapai tujuan pemerintahan. Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian oleh Yayat Rukayat,dkk (2021) dikatakan bahwa Salah satu cara untuk mempersatukan upaya dari setiap lembaga yang ada di desa dalam menyusun dokumen perencanaan pemerintah di desa adalah dengan melakukan koordinasi. Ini dilakukan untuk mempermudah proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, terutama pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa dan menurunkan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pembangunan sarana dan prasarana.

4.2.3. Keterkaitan Antar Indikator-Indikator

1. Kaitan Indikator Peran Antar Pribadi (*Interpersonal Role*) dengan Fokus Pada Tujuan

Pentingnya peran antar pribadi Pj. Kepala Desa dalam mengelola kerjasama kelembagaan di Desa Tetelesi I. Tugasnya termasuk mendukung kegiatan kelembagaan, menjaga hubungan baik, memberikan teguran, dan menyelesaikan masalah. Semua ini

membantu mencapai tujuan. Namun, hasil yang diinginkan juga dipengaruhi oleh masalah komunikasi dan pemahaman kebijakan, serta keseimbangan antara proaktif dan kehati-hatian. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan, pemahaman dan komunikasi yang lebih baik serta pencapaian keseimbangan yang lebih baik dalam pengelolaan tanggung jawab kepala desa sangat penting.

2. Kaitan Indikator Peran Antar Pribadi (*Interpersonal Role*) dengan Saling Memberi Motivasi

Pj. Kepala Desa aktif dalam menjalankan tanggung jawabnya dan menjaga hubungan baik dengan lembaga dan masyarakat menciptakan lingkungan yang mendorong lembaga desa untuk bergerak maju. Untuk mencapai tujuan pembangunan desa, lembaga desa seperti PKK, LPM, dan BPD dapat bekerjasama dan mendorong satu sama lain dengan dukungan dan komunikasi yang kuat ini. Oleh karena itu, peran kepala desa yang efektif dalam peran antar pribadi dapat berkontribusi positif terhadap motivasi dan kerjasama yang kuat antar lembaga desa selama pembangunan Desa Tetehosi I.

3. Kaitan Indikator Peran Antar Pribadi (*Interpersonal Role*) dengan Menjalinkan Kerjasama Sesama Tim

Pj. Kepala Desa menjalankan tugasnya dengan baik, mendukung kegiatan kelembagaan dan masyarakat, menjaga hubungan baik dengan lembaga dan masyarakat, dan memberikan saran, solusi, dan teguran yang diperlukan. Namun, kerjasama tim sulit, terutama dalam hal komunikasi dan partisipasi aktif anggota tim dari berbagai lembaga. Untuk meningkatkan kerjasama kelembagaan di desa, perlu dilakukan tindakan konkret untuk memastikan bahwa masyarakat dan lembaga dapat berpartisipasi secara aktif dan memahami maksud dari kebijakan yang diberikan oleh Pj. Kepala Desa, sehingga tujuan pemerintahan desa dapat dicapai dengan lebih efisien.

4. Kaitan Indikator Peran Antar Pribadi (*Interpersonal Role*) dengan Koordinasi Dalam Proses Menyelesaikan Tugas

Pj. Kepala Desa menjaga hubungan baik dengan lembaga dan masyarakat serta memberikan saran, solusi, dan teguran yang diperlukan, meningkatkan koordinasi dalam proses menyelesaikan tugas di desa Tetehosi I. Peran antar pribadi yang aktif dan efektif dari Pj. Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya berdampak positif pada koordinasi dalam proses menyelesaikan tugas di desa Tetehosi I. Meskipun ada perbedaan prioritas yang menghambat proses, kepala desa yang aktif dapat membantu mengatasi masalah ini dengan memastikan bahwa semua orang terlibat secara aktif dan memahami maksud dari kebijakan yang diberikan. Jadi, untuk mencapai tujuan pemerintahan desa Tetehosi I yang lebih baik, peran kepala desa yang kuat dalam interaksi interpersonal dapat membantu memperbaiki koordinasi antar lembaga.

5. Kaitan Indikator Peran Yang Berhubungan dengan Informasi (*Information Role*) dengan Fokus Pada Tujuan

Peran informasi kepala desa memengaruhi fokus pada tujuan. Kepala desa memiliki peran yang kuat dalam memastikan kegiatan organisasi berjalan lancar dan memberikan informasi transparan kepada masyarakat dan lembaga. Namun, informasi belum sampai ke lembaga desa seperti BPD, LPM, PKK, dan BUMDes. Akibatnya, pengambilan keputusan atau perencanaan kegiatan penting tertunda. Di tingkat kelembagaan desa, ini menghambat kerjasama dan perencanaan. Ada juga kebutuhan untuk meningkatkan komunikasi dan penyebaran informasi untuk mencapai tujuan pengelolaan kelembagaan desa yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, terlalu banyak kehati-hatian dalam mengambil tindakan dapat menghambat pencapaian tujuan secara efektif.

6. Kaitan Indikator Peran Yang Berhubungan dengan Informasi (*Information Role*) dengan Saling Memberi Motivasi

Kepala desa memiliki peran yang kuat dalam memastikan semua kegiatan organisasi berjalan lancar dan semua informasi disampaikan dengan jelas kepada masyarakat desa dan lembaga-lembaga yang bermitra dengannya. Namun, penyampaian informasi kepada lembaga desa lainnya dapat menghambat kerjasama dan persiapan. Meskipun demikian, lembaga desa saling mendorong untuk mencapai tujuan pembangunan desa, meningkatkan keterampilan, dan tetap berkomitmen pada kerjasama. Dalam konteks ini, peran kepala desa dalam membantu komunikasi dan penyebaran informasi sangat penting untuk mendorong motivasi dan keberhasilan kerjasama antar lembaga desa dalam mencapai tujuan pembangunan.

7. Kaitan Indikator Peran Yang Berhubungan dengan Informasi (*Information Role*) dengan Menjalin Kerjasama Sesama Tim

Kepala desa memiliki peran yang kuat dalam menjamin bahwa kegiatan organisasi berjalan lancar dan bahwa informasi disampaikan secara transparan kepada masyarakat dan lembaga. Namun, informasi tidak selalu disampaikan kepada lembaga desa lainnya seperti BPD, LPM, PKK, dan BUMDes. Ini menghambat kerjasama dan perencanaan di tingkat kelembagaan desa. Oleh karena itu, peningkatan komunikasi dan penyebaran informasi serta keterlibatan aktif anggota tim dari berbagai lembaga diperlukan untuk meningkatkan kerjasama dan pencapaian tujuan pemerintahan desa. Dengan kata lain, kemampuan Kepala Desa untuk bekerjasama dengan kelompok kelembagaan desa dipengaruhi langsung oleh bagaimana dia melakukan tanggung jawab informasi.

8. Kaitan Indikator Peran Yang Berhubungan dengan Informasi (*Information Role*) dengan Koordinasi Dalam Proses Menyelesaikan Tugas

Peran Kepala Desa di Desa Tetehosi I sangat memengaruhi transparansi informasi kepada masyarakat dan lembaga serta kelancaran kegiatan organisasi. Namun, informasi masih terkendala kepada lembaga desa lainnya seperti BPD, LPM, PKK, dan BUMDes. Akibatnya, pengambilan keputusan dan perencanaan kegiatan penting tertunda. Meskipun lembaga desa bekerjasama dengan baik, perbedaan prioritas dan fokus dapat mengganggu koordinasi yang optimal. Akibatnya, untuk memastikan bahwa kerjasama kelembagaan di Desa Tetehosi I berjalan dengan baik dan efektif, diperlukan peningkatan komunikasi dan penyebaran informasi serta upaya koordinasi yang lebih baik.

9. Kaitan Indikator Peran Pengambil Keputusan (*Decisional Role*) dengan Fokus Pada Tujuan

Dalam kebanyakan kasus, pengambilan keputusan dalam pemerintahan desa melibatkan masyarakat dan lembaga desa dalam mempertimbangkan kebijakan dan pertimbangan realistis untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Namun, sebagian besar masyarakat tidak aktif terlibat dalam proses ini dan tidak memahaminya dengan baik. Seharusnya masyarakat dan lembaga desa harus lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan desa. Agar program-program yang diterapkan berjalan dengan baik, kepala desa harus mencari keseimbangan antara tindakan proaktif dan kehati-hatian dalam mencapai tujuan. Mereka harus menghindari terlalu banyak kehati-hatian yang dapat menghambat kemajuan.

10. Kaitan Indikator Peran Pengambil Keputusan (*Decisional Role*) dengan Saling Memberi Motivasi

Di Desa Tetehosi I, peran kepala desa sangat penting dalam mengelola kerjasama kelembagaan. Secara umum, proses pengambilan keputusan pemerintahan desa berjalan dengan baik, tetapi mayoritas

orang tidak terlibat aktif dalam proses tersebut. Meskipun demikian, lembaga pembangunan desa seperti LPM dan BPD mendukung dan mendorong satu sama lain untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, motivasi ini mendorong kerjasama yang erat antar lembaga desa. Peran kepala desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dan memotivasi lembaga desa sangat penting untuk menjaga kerjasama dan mencapai tujuan pembangunan Desa Tetehosi I yang lebih baik.

11. Kaitan Indikator Peran Pengambil Keputusan (*Decisional Role*) dengan Menjalinkan Kerjasama Sesama Tim

Langkah penting untuk meningkatkan kerjasama tim di tingkat lembaga desa adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan desa. Proses pengambilan keputusan dapat menjadi lebih jelas dan inklusif jika masyarakat lebih terlibat dan memahami kebijakan yang dibuat. Selain itu, langkah-langkah konkret harus diambil untuk meningkatkan komunikasi dan keterlibatan anggota tim dari berbagai lembaga, termasuk kepala desa, agar mereka dapat bekerjasama dengan lebih baik untuk mencapai tujuan pemerintahan desa.

12. Kaitan Indikator Peran Pengambil Keputusan (*Decisional Role*) dengan Koordinasi Dalam Proses Menyelesaikan Tugas

Secara keseluruhan, peran pengambil keputusan dalam pemerintahan desa Tetehosi I berjalan dengan baik. Dalam proses ini, masyarakat dan lembaga desa dilibatkan dalam pertimbangan kebijakan dan tujuan pembangunan desa. Namun, mayoritas masyarakat tidak aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan kurang memahaminya. Sementara itu, ada perbedaan prioritas yang dapat menghambat proses koordinasi antar lembaga desa. Untuk mencapai tujuan pemerintahan dengan lebih efisien, upaya lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga desa.

Dengan demikian, peningkatan partisipasi masyarakat dan lembaga dalam pengambilan keputusan dan kesadaran masyarakat tentang proses tersebut dapat membantu koordinasi antarlembaga desa.

Tabel 4.1
Kaitan Peran Kepala Desa dalam Mengelola Kerjasama di Pemerintahan Desa
Tetehosi I

No.	Kaitan	Hasil (Pendukung/Penghambat)
1.	Kaitan Indikator Peran Antar Pribadi (<i>Interpersonal Role</i>) dengan Fokus Pada Tujuan	Penghambat
2.	Kaitan Indikator Peran Antar Pribadi (<i>Interpersonal Role</i>) dengan Saling Memberi Motivasi	Pendukung
3.	Kaitan Indikator Peran Antar Pribadi (<i>Interpersonal Role</i>) dengan Menjalिन Kerjasama Sesama Tim	Penghambat
4.	Kaitan Indikator Peran Antar Pribadi (<i>Interpersonal Role</i>) dengan Koordinasi Dalam Proses Menyelesaikan Tugas	Pendukung
5.	Kaitan Indikator Peran Yang Berhubungan dengan Informasi (<i>Information Role</i>) dengan Fokus Pada Tujuan	Penghambat
6.	Kaitan Indikator Peran Yang Berhubungan dengan Informasi (<i>Information Role</i>) dengan Saling Memberi Motivasi	Pendukung
7.	Kaitan Indikator Peran Yang Berhubungan dengan Informasi (<i>Information Role</i>) dengan Menjalिन Kerjasama Sesama Tim	Penghambat
8.	Kaitan Indikator Peran Yang Berhubungan dengan Informasi (<i>Information Role</i>) dengan	Penghambat

	Koordinasi Dalam Proses Menyelesaikan Tugas	
9.	Kaitan Indikator Peran Pengambil Keputusan (<i>Decisional Role</i>) dengan Fokus Pada Tujuan	Penghambat
10.	Kaitan Indikator Peran Pengambil Keputusan (<i>Decisional Role</i>) dengan Saling Memberi Motivasi	Pendukung
11.	Kaitan Indikator Peran Pengambil Keputusan (<i>Decisional Role</i>) dengan Menjalin Kerjasama Sesama Tim	Pendukung
12.	Kaitan Indikator Peran Pengambil Keputusan (<i>Decisional Role</i>) dengan Koordinasi Dalam Proses Menyelesaikan Tugas	Penghambat

4.3. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran Kepala Desa Dalam Mengelola Kerjasama Kelembagaan Di Pemerintahan Desa Tetelesi I

4.3.1. Faktor Pendukung

Beberapa hal dibawah ini merupakan faktor-faktor pendukung yang dilakukan oleh Pj. Kepala Desa dalam melaksanakan peran kepala desa dalam mengelola kerjasama kelembagaan di pemerintahan desa Tetelesi I

1. Aktif dalam menjalankan tugas

Pj. Kepala Desa aktif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk menjaga hubungan baik dengan lembaga dan masyarakat. Dengan demikian, fondasi yang kuat dibangun untuk mendorong kerjasama antar lembaga desa.

2. Komunikasi yang kuat

Kepala desa bertanggung jawab untuk menjamin bahwa lembaga desa berkomunikasi dengan baik dan efektif satu sama lain. Komunikasi yang efektif merupakan komponen penting untuk meningkatkan kerjasama. Pj.

kepala desa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi disampaikan dengan jelas kepada masyarakat dan lembaga yang bermitra.

3. Dukungan dan Motivasi

Pj. Kepala Desa mendorong lembaga desa seperti PKK, LPM, dan BPD untuk berkolaborasi dan mendorong satu sama lain. Motivasi ini dapat menumbuhkan semangat kerjasama yang positif di antara organisasi.

4. Pengendalian proses pengambilan keputusan

Kepala desa sangat bertanggung jawab atas proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh desa mereka. Meskipun mayoritas masyarakat tidak berpartisipasi secara aktif, Penjabat Kepala Desa dapat memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mendorong kerjasama antar lembaga desa dan mendorong mereka untuk bermotivasi.

5. Inklusivitas dalam pengambilan keputusan

Pj. Kepala Desa berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang proses pengambilan keputusan desa dan melibatkan mereka dalam proses tersebut. Ini membantu membuat kebijakan lebih inklusif dan mendukung kerjasama tim di tingkat lembaga desa.

6. Mendorong keterlibatan aktif anggota tim

Pj. Kepala Desa berusaha untuk mendorong anggota tim dari berbagai lembaga untuk lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Ini meningkatkan kerjasama antar lembaga desa.

4.3.2. Faktor Penghambat

Beberapa hal dibawah ini merupakan faktor-faktor penghambat yang ditemui oleh Pj. Kepala Desa dalam melaksanakan peran kepala desa dalam mengelola kerjasama kelembagaan di pemerintahan desa Tetehosi I

1. Keterbatasan Penyebaran Informasi

Ini adalah salah satu penghalang utama. Kepala desa tampaknya tidak menjalankan peran informasi mereka dengan baik, sehingga informasi

tidak selalu sampai ke lembaga desa lainnya seperti BPD, LPM, PKK, dan BUMDes. Kekurangan informasi yang diperlukan untuk merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan menghambat kerjasama antarlembaga.

2. Kurangnya keterlibatan aktif anggota tim

Kepala desa mungkin menemukan bahwa melibatkan anggota tim dari berbagai lembaga desa mungkin sulit. Untuk mengelola kerjasama dengan baik dan mencapai tujuan pemerintahan desa, partisipasi aktif setiap anggota tim dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan sangat penting. Jika anggota tim tidak berpartisipasi secara aktif atau kurang berpartisipasi, kerjasama dapat terganggu.

3. Perbedaan Prioritas dan Fokus

Lembaga desa memiliki prioritas dan fokus yang berbeda. Hal ini dapat mengganggu kerjasama dan koordinasi terbaik. Untuk memastikan bahwa semua pihak mencapai tujuan yang sama, kepala desa harus mampu memfasilitasi percakapan dan mencapai kesepakatan antara berbagai lembaga.

4. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Faktor lain yang menghambat upaya kepala desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa adalah masyarakat tidak aktif terlibat dalam pengambilan keputusan dan tidak memahami proses pengambilan keputusan.

4.4. Strategi Yang Dilakukan Kepala Desa Dalam Mengelola Kerjasama Kelembagaan Di Pemerintahan Desa Tetehosi I Kota Gunungsitoli

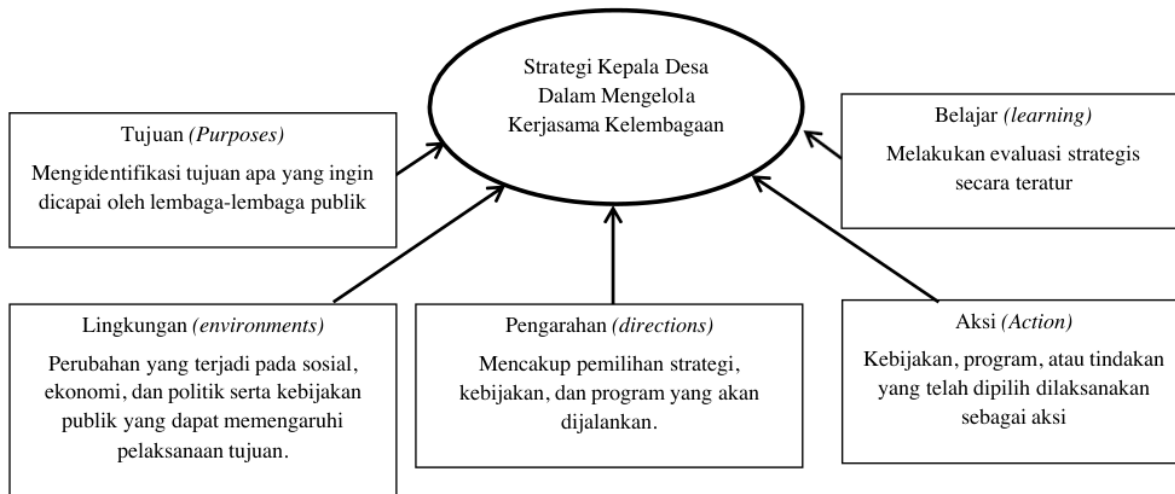
Kepala desa adalah bagian penting dari sistem pemerintahan suatu negara, dan mereka memiliki peran penting dalam menjamin keberlangsungan berbagai program dan kegiatan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa. Kemampuan untuk mengelola kerjasama kelembagaan dengan baik adalah bagian yang sangat penting dari menjadi kepala desa. Kepala desa Tetehosi I bertanggung

jawab untuk menjamin kerjasama yang efektif antara berbagai lembaga dan lembaga terkait.

Untuk lebih jelasnya strategi kepala desa dalam mengelola kerjasama kelembagaan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 4.

Strategi Kepala Desa Dalam Mengelola Kerjasama Kelembagaan



Sumber : Olahan peneliti dari berbagai referensi

Berdasarkan gambar diatas, maka Kepala Desa Tetehosi I dapat menggunakan strategi-strategi berikut untuk mengelola kerjasama kelembagaan. Dengan mempertimbangkan konsep strategi publik yang diuraikan oleh Mulgan, strategi-strategi ini dapat digunakan :

1. Tujuan (*Purposes*)

Mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai adalah langkah pertama dalam mengelola kerjasama kelembagaan. Kepala Desa Tetehosi I harus bekerjasama dengan organisasi dan lembaga terkait untuk menentukan tujuan bersama. Tujuan seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan infrastruktur desa, atau meningkatkan layanan publik adalah semua contoh tujuan yang harus dicapai bersama. Semua orang yang bekerjasama dalam kelembagaan akan memiliki tujuan yang jelas dan

dapat diukur untuk digunakan sebagai panduan. Kepala desa berkomitmen untuk mencapai tujuan kerjasama kelembagaan, meskipun ada beberapa hambatan yang perlu diatasi. Tujuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang merupakan komitmen pemerintah.

Kepala Desa Tetelesi I telah membuat strategi tujuan yang teliti dan berkonsentrasi pada meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kerjasama kelembagaan di wilayahnya. Hal ini adalah langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa semua orang yang bekerjasama memahami tujuan kerjasama yang ingin dicapai. Kepala desa telah bekerjasama dengan banyak lembaga dan organisasi di tingkat desa untuk mencapai tujuan ini, terutama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Salah satu tujuan utama dari strategi ini adalah untuk membuat dan menetapkan tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tetelesi I. Tujuan ini termasuk meningkatkan layanan publik dan infrastruktur desa. Kepala desa telah berusaha untuk membuat agenda yang jelas dan merinci langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut melalui pertemuan dan diskusi dengan Bappeda dan organisasi desa lainnya. Untuk menjamin bahwa kolaborasi institusional ini berjalan dengan baik, mengambil tindakan konkret seperti mengalokasikan sumber daya, menentukan prioritas pembangunan, dan memantau kemajuan.

Secara keseluruhan, Kepala Desa Tetelesi I menggunakan strategi tujuan sebagai landasan kuat untuk memajukan wilayah, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan menghasilkan perkembangan desa, infrastruktur, dan pelayanan publik yang lebih baik.

2. Lingkungan (*environments*)

Kepala Desa Tetelesi I harus terus mengawasi faktor-faktor luar yang dapat memengaruhi kerjasama kelembagaan. Ini termasuk perubahan yang terjadi di lingkungan sosial, ekonomi, dan politik desa, serta perubahan yang terjadi pada kebijakan publik nasional yang dapat

memengaruhi pelaksanaan program di desa. Kepala desa dapat membuat rencana dan strategi kerjasama lebih baik dengan memahami lingkungan yang berubah. Kepala desa harus benar-benar memahami lingkungan Desa Tetelesi I. Situasi sosial, ekonomi, politik, dan budaya desa disebut lingkungan.

Kepala Desa Tetelesi I telah mengambil beberapa tindakan strategis untuk mengatasi masalah masyarakat yang tidak memahami kebijakan pemerintah dan hambatan komunikasi. Identifikasi elemen sosial dan budaya yang memengaruhi masyarakat desa ini adalah langkah pertama yang dilakukan. Dalam situasi ini, kepala desa menggunakan metode analisis lingkungan yang menyeluruh, yang melibatkan pengamatan langsung, wawancara, dan keterlibatan aktif dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kepala desa lebih memahami prinsip, kebiasaan sosial, dan cara komunikasi yang mendominasi desa.

Kepala desa telah mengadakan diskusi terbuka dan terstruktur dengan pemimpin lokal, tokoh masyarakat, dan warga desa setelah identifikasi awal. Ia menciptakan ruang di mana masyarakat dapat berbicara tentang masalah mereka, mendengar pendapat mereka, dan memberikan klarifikasi tentang kebijakan pemerintah. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengurangi kesenjangan pemahaman dan mendorong semua orang untuk memahami satu sama lain.

Selain itu, sebagai bagian dari strategi lingkungan, kepala desa telah memfasilitasi pelatihan dan workshop masyarakat tentang kebijakan dan komunikasi efektif. Dengan demikian, kepala desa telah menciptakan lingkungan di mana masyarakat dapat belajar, berbicara, dan lebih memahami kebijakan pemerintah serta mengatasi hambatan komunikasi.

Dengan menggunakan strategi ini, kepala desa Tetelesi I berhasil mengubah dinamika sosial dan budaya desa, mengatasi kesulitan komunikasi, dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kebijakan pemerintah. Dengan menerapkan strategi lingkungannya, dia telah memungkinkan kerjasama yang lebih baik antara pemerintah desa dan

warganya. Ini juga menunjukkan bagaimana memahami konteks sosial dan budaya penting untuk pemecahan masalah yang berkelanjutan.

3. Pengarahan (*directions*)

Pemilihan strategi, kebijakan, dan program untuk dilaksanakan bersama dengan masyarakat dan lembaga terkait termasuk dalam pengarahannya kerjasama kelembagaan. Ini mencakup perencanaan tindakan bersama, alokasi sumber daya, dan pemilihan metode pelaksanaan. Kepala Desa Tetehosi I harus memastikan bahwa semua orang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dibuat akan membantu semua orang dan mencapai tujuan desa. Dalam hal pengelolaan kerjasama kelembagaan, kepala desa berperan penting. Dalam temuan dilapangan, peneliti menemukan bahwa dengan menggunakan berbagai strategi pengarahannya, Kepala Desa Tetehosi I telah menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan masalah pemahaman kebijakan di desanya. Strategi-strategi ini menunjukkan komitmennya untuk menciptakan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas bersama masyarakat dan lembaga desa lainnya. Kepala desa ini berhasil membangun hubungan yang kuat dengan warga desa dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar memenuhi keinginan mereka melalui upaya yang cermat dan proaktif.

Pertama-tama, kepala desa Tetehosi I menyadari betapa pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Untuk alasan ini, ia mengadakan pertemuan desa terbuka secara teratur di mana setiap warga desa memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat, memberikan umpan balik, dan mengajukan pertanyaan tentang rencana pembangunan desa. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka.

Selain itu, kepala desa Tetehosi I bekerjasama dengan organisasi desa lainnya. Dia secara teratur mengadakan pertemuan koordinasi dengan kepala lembaga dan anggota dewan desa karena dia menyadari bahwa bekerjasama dengan berbagai kelompok adalah penting untuk mencapai

tujuan bersama. Ini memungkinkan mereka untuk mencapai visi bersama dan memastikan bahwa tujuan pembangunan desa secara keseluruhan didukung oleh setiap kebijakan yang diberlakukan.

Untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat, termasuk mereka yang kurang terwakili, memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka tentang rencana pembangunan desa, kepala desa Tetehosi I mengikuti prinsip inklusivitas dalam seluruh proses kebijakan. Oleh karena itu, ia telah berhasil menciptakan iklim kerjasama dan inklusif di mana setiap warga desa merasa diperhatikan dan terlibat. Secara keseluruhan, kepala desa Tetehosi I telah berhasil mengarahkan pembangunan desa dengan mengedepankan partisipasi masyarakat, kolaborasi antar lembaga, pengetahuan eksternal, inklusi, dan pemantauan dan evaluasi yang cermat. Strategi pengarahannya yang cermat, yang berfokus pada kebutuhan dan aspirasi bersama, telah menciptakan fondasi yang kuat untuk pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif.

4. Aksi (*Action*)

Pelaksanaan tindakan adalah langkah selanjutnya setelah kebijakan, program, dan tindakan yang direncanakan telah ditetapkan. Ini melibatkan semua masyarakat dan lembaga yang terlibat untuk bekerjasama satu sama lain agar program yang telah dipilih dapat dilaksanakan dengan baik. Kepala Desa Tetehosi I bertanggung jawab untuk mendorong kerjasama yang efektif, menjamin alokasi sumber daya yang tepat, dan secara teratur memantau pelaksanaan program. Dalam hal pengelolaan kerjasama kelembagaan, kepala desa berperan penting. Tindakan nyata dalam mengelola kerjasama sangat penting untuk keberhasilan suatu kelembagaan. Dalam kasus ini, Pj. Kepala desa telah memainkan peran penting dalam upaya untuk mengatasi masalah komunikasi yang kurang efektif yang terkait dengan pembangunan desa. Tindakan Pj. Kepala desa dalam menawarkan solusi adalah bukti komitmennya untuk meningkatkan kualitas kerja lembaga desa.

Keberhasilan kelembagaan tidak hanya menjadi tanggungjawab dari kepala desa saja, Sangat penting untuk melibatkan lebih banyak pihak

dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas memerlukan kerjasama antara pihak-pihak yang berkepentingan, seperti tokoh masyarakat, dan warga desa secara keseluruhan. Sebuah pendekatan tindakan yang luar biasa telah ditunjukkan oleh kepala desa Tetelesi I untuk meningkatkan dinamika sosial dan budaya di desanya. Dia tidak hanya berusaha untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kebijakan pemerintah, tetapi juga berusaha untuk memperbaiki komunikasi dan membantu orang belajar. Strategi ini terdiri dari sejumlah langkah penting yang menggambarkan pendekatan pemecahan masalah berkelanjutan.

Pertama, kepala desa menyadari betapa pentingnya masyarakat memahami kebijakan pemerintah. Akibatnya, dia memulai dengan memberikan pelatihan dan seminar tentang kebijakan tersebut. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih memahami bagaimana kebijakan pemerintah memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka.

Selain itu, kepala desa memberikan perhatian khusus untuk mengatasi masalah komunikasi dalam komunitasnya karena dia menyadari bahwa komunikasi yang efektif adalah kunci untuk kerjasama yang lebih baik antara pemerintah desa dan warganya. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih bebas berbicara, bertukar pendapat, dan saling memahami.

Strategi ini menghasilkan lingkungan di mana orang dapat belajar, berbicara, dan memahami kebijakan pemerintah. Selain meningkatkan pemahaman mereka, hal ini memungkinkan kerjasama yang lebih baik antara warga dan pemerintah desa. Pemahaman konteks sosial dan budaya sangat penting untuk memecahkan masalah yang berkelanjutan, menurut Kepala Desa Tetelesi I. Dia telah mencapai kemajuan besar dalam desanya dengan menerapkan pendekatan ini.

5. Belajar (*learning*)

Dalam strategi kepala desa, komponen belajar sangat penting. Belajar dalam konteks kerjasama kelembagaan berarti melakukan evaluasi strategis secara konsisten. Kepala Desa Tetelesi I dan semua pihak yang

terlibat harus memantau hasil, mengevaluasi efek, dan belajar dari pengalaman. Ini mencakup mengidentifikasi apa yang berhasil dan apa yang tidak, dan mengambil pelajaran penting dari pekerjaan tim. Belajar adalah alat yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan memperbaiki rencana masa depan.

Kepala Desa Tetelesi I telah menemukan masalah yang menghalangi kerjasama dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di desa. Masyarakat tidak memahami kebijakan desa, yang merupakan salah satu masalah utama yang diungkapkan. Kepala desa telah memilih untuk menggunakan strategi pembelajaran yang efektif untuk mengatasi masalah ini.

Pertama, kepala desa memulai program pendidikan dan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kebijakan desa. Program ini menggunakan berbagai metode, termasuk pelatihan, workshop, dan penyuluhan. Warga desa memiliki kesempatan untuk belajar tentang peran kebijakan desa dan seberapa pentingnya itu dalam proses pembangunan. Ini akan membantu mengatasi kesulitan pemahaman yang telah ada sebelumnya.

Kepala desa juga mendorong kerjasama dengan lembaga desa lainnya. Ini menghasilkan koordinasi yang lebih baik di antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan desa. Tujuan dari upaya ini adalah untuk mengatasi masalah yang paling penting dan mendukung kemajuan desa. Jadi, lembaga desa dan masyarakat dapat belajar satu sama lain, lebih memahami satu sama lain, dan bekerjasama dengan lebih baik.

Secara keseluruhan, untuk mengatasi masalah pemahaman kebijakan desa, kepala desa telah menerapkan strategi pembelajaran yang melibatkan instruksi, penyuluhan, dan kolaborasi. Diharapkan strategi ini akan meningkatkan kerjasama dan pembangunan desa secara keseluruhan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan pembangunan Desa Tetelesi I sangat dipengaruhi oleh peran kepala desa dalam mengelola kerjasama kelembagaan. Kepala Desa harus menjaga hubungan baik, memberikan teguran, dan menyelesaikan masalah untuk mendorong kerja sama dalam peran mereka sebagai individu. Tetapi untuk mencapai tujuan dengan lebih efisien, masalah komunikasi dan pemahaman kebijakan serta keseimbangan proaktif dan kehati-hatian harus diatasi. Kepala Desa juga bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan lembaga. Namun, hambatan dalam penyebaran informasi dapat menghambat kerja sama dan perencanaan. Untuk mencapai tujuan pengelolaan kelembagaan desa yang lebih efektif, diperlukan komunikasi yang lebih baik dan informasi yang lebih luas. Sangat penting bagi masyarakat dan lembaga desa untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam posisi pengambil keputusan. Tidak hanya diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat tentang proses ini, tetapi juga perlu dilakukan tindakan konkret untuk meningkatkan komunikasi dan keterlibatan anggota tim dari berbagai lembaga. Ini akan membantu memastikan kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Akibatnya, peran kepala desa sangat relevan dengan tujuan kerjasama kelembagaan di Desa Tetelesi I. Kepala desa dapat membantu mencapai tujuan pembangunan desa dengan lebih efisien dan mendorong kerja sama antar lembaga melalui upaya komunikasi yang kuat, penyebaran informasi, dan partisipasi masyarakat.
2. Beberapa hal dibawah ini merupakan faktor-faktor pendukung dan penghambat Pj. Kepala Desa dalam melaksanakan peran kepala desa dalam mengelola kerjasama kelembagaan di pemerintahan desa Tetelesi I
 - ❖ Faktor pendukung
 1. Aktif dalam menjalankan tugas
 2. Komunikasi yang kuat
 3. Dukungan dan Motivasi
 4. Pengendalian proses pengambilan keputusan
 5. Inklusivitas dalam pengambilan keputusan
 6. Mendorong keterlibatan aktif anggota tim

❖ Faktor Penghambat

1. Keterbatasan Penyebaran Informasi
 2. Kurangnya keterlibatan aktif anggota tim
 3. Perbedaan Prioritas dan Fokus
 4. Kurangnya Partisipasi Masyarakat
3. Dalam pemerintahan desanya, Kepala Desa Tetelesi I telah menerapkan beberapa strategi penting untuk mengelola kerja sama kelembagaan. Kepala Desa Tetelesi I menggunakan strategi ini untuk mencapai hasil berikut:
- a. Tujuan (*Purposes*). Kepala Desa Tetelesi I telah bekerja sama dengan lembaga dan organisasi terkait untuk menetapkan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, layanan publik, dan infrastruktur desa. Strategi tujuan ini telah membuat pedoman yang jelas untuk semua orang yang bekerja sama dengan kelembagaan.
 - b. Lingkungan (*environments*). Kepala Desa Tetelesi I menyadari betapa pentingnya untuk mengamati perubahan dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan politik desa. Dengan melakukan analisis mendalam, dia berharap dapat memahami konteks sosial dan budaya desanya. Ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang masyarakat desa dan pemecahan masalah yang lebih efisien.
 - c. Pengarahan (*Direction*). Kepala Desa Tetelesi I menggunakan pendekatan yang inklusif dalam proses membuat kebijakan dan pengambilan keputusan. Dalam menentukan arah pembangunan desa, ia memastikan masyarakat terlibat secara aktif dan bekerja sama dengan berbagai kelompok. Strategi pengarahan ini menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.
 - d. Aksi (*Action*) Kepala Desa Tetelesi I telah mendorong semua pihak yang terlibat untuk melakukan tindakan bersama. Ia memantau program secara teratur dan memastikan bahwa sumber daya dialokasikan dengan tepat. Ini menghasilkan kerja sama yang baik untuk mencapai tujuan pembangunan desa.
 - e. Belajar (*Learning*) Untuk menemukan masalah yang berkaitan dengan kerja sama dan keterlibatan masyarakat, Kepala Desa Tetelesi I menggunakan pendekatan pembelajaran. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kebijakan desa, ia menyelenggarakan kursus dan penyuluhan. Selain itu, ia mendorong kerja sama dan kolaborasi dengan lembaga desa lainnya untuk pembelajaran bersama.

5.2. Saran

1. Kepala desa harus meningkatkan komunikasi dan pemahaman kebijakan. Ini dapat dicapai dengan mengadakan workshop atau pertemuan rutin yang melibatkan seluruh lembaga dan masyarakat desa. Dalam situasi seperti ini, kepala desa harus memainkan peran penting dalam memungkinkan diskusi yang berhasil dan memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan dan rencana pembangunan desa. Oleh karena itu, akan tercipta visi dan jalan yang selaras, yang akan mendorong kerja sama.
2. Kepala desa harus memastikan bahwa informasi tentang kebijakan, program pembangunan, dan perkembangan penting lainnya dapat diakses dengan mudah melalui situs web desa, media sosial, atau pengumuman di tempat umum. Oleh karena itu, akan ada lebih banyak transparansi, dan masyarakat dan lembaga akan lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
3. Sangat penting bagi kepala desa untuk mendorong masyarakat dan lembaga untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa, berbagai pihak harus mendorong pertukaran ide, masukan, dan aspirasi. Ini dapat dicapai dengan membentuk tim konsultatif yang terdiri dari orang-orang dari berbagai kelompok dan lembaga. Kepala desa harus memastikan bahwa semua pihak mendapat perhatian dan suara mereka didengar.

Selain itu dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti selanjutnya khususnya dalam melihat peran kepala desa dalam mengelola kerjasama yang bersifat diversitas dimana masih terdapat ruang untuk dilakukan penelitian selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan substansi teknologi yang menysasar pada elaborasi secara daring dalam peningkatan tidak sebatas menggunakan media teknologi melalui aplikasi social media, tetapi mengarah pada dimensi yang lebih lagi untuk kesuksesan pemerintahan local demi mengikuti perkembangan era digitalisasi dan modernisasi.

PERAN KEPALA DESA DALAM MENGELOLA KERJASAMA KELEMBAGAAN DI PEMERINTAHAN DESA TETEHOSSI I KOTA GUNUNGSITOLI

ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.umpo.ac.id Internet Source	3%
2	Submitted to vitka Student Paper	2%
3	repository.ummat.ac.id Internet Source	2%
4	repo.apmd.ac.id Internet Source	1%
5	files.osf.io Internet Source	1%
6	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%
7	123dok.com Internet Source	1%
8	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off

PERAN KEPALA DESA DALAM MENGELOLA KERJASAMA KELEMBAGAAN DI PEMERINTAHAN DESA TETEHOSSI I KOTA GUNUNGSITOLI

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77

PAGE 78

PAGE 79

PAGE 80

PAGE 81

PAGE 82

PAGE 83

PAGE 84

PAGE 85

PAGE 86

PAGE 87

PAGE 88

PAGE 89

PAGE 90

PAGE 91

PAGE 92

PAGE 93

PAGE 94

PAGE 95
